

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gagasan pembaruan atau similar dengan “modernisasi” pendidikan Islam mempunyai akar-akarnya dalam gagasan tentang modernisme pemikiran dan institusi Islam secara keseluruhan. Dengan kata lain modernisme pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan kebangkitan gagasan modernisme Islam.¹⁰⁴

Cepatnya arus dunia pendidikan, bagaimanapun telah menuntut respon yang tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan, jika kaum Muslimin – termasuk Indonesia- tidak hanya ingin sekedar *survive* di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap tampil di depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan. Kesadaran semacam ini, telah mulai berkembang dikalangan pemikir dan penanggungjawab pendidikan Islam di Indonesia.

A. Pembaruan Pendidikan Islam

Dalam al-Qur’an tampak jelas adanya perintah seseorang yang beriman untuk selalu menghidupkan dan meningkatkan etos kerja untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang. Di mana hal itu merupakan salah satu wujud keimanan, atau dengan kata lain ada keterkaitan erat antara

¹⁰⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. 31.

keimanan dengan etos kerja, etos sosial yang akhirnya terjadi perubahan yang lebih baik. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 177

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah Timur dan Barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertaqwa” (QS. Al-Baqarah: 177)

Iman itu harus disertai dengan dan ditandai dengan amal perbuatan yang nyata, sebagaimana diuraikan dalam ayat ini yaitu; memberikan harta yang dicintai kepada yang membutuhkannya. Memberikan bantuan kepada anak yatim, memberikan harta kepada orang-orang musafir yang kehabisan bekal dan memberikan harta benda untuk memerdekakan hamba sahaya sehingga ia memperoleh kemerdekaan. Serta melaksanakan shalat pada waktunya dengan khusyu’

Ikhtiar menghidupkan etos kerja ini terus menerus merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan sedang berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya.

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pemberdayaan dan peningkatan kualitasnya, sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (primitif). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan

untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa datang.

Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa di masa mendatang, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, sebagaimana tersirat dalam rumusan fungsi dan tujuan pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, menggambarkan tentang kehendak yang akan dicapai bangsa ini untuk masyarakatnya, yaitu masyarakat yang beriman, taqwa dan berketrampilan.¹⁰⁵

Entri point dari usaha pendidikan adalah pemberdayaan manusia, dimana pendidikan mempunyai peran sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan dan peran kehidupannya di masa mendatang. Demikian ini terbukti dalam kehidupan sosial dewasa ini yaitu di mana pendidikan tampil dengan gaya pengaruh yang sangat besar dan menjadi variabel pokok masa depan manusia.

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga 'belajar', tetapi lebih ditentukan oleh insting, sedangkan bagi manusia, belajar berarti rangkaian kegiatan menuju 'pendewasaan' guna menuju kehidupan yang lebih berarti.¹⁰⁶

Oleh karena itu berbagai pandangan menyatakan pendidikan merupakan proses budaya untuk mengangkat "harkat" dan "martabat" manusia dan

¹⁰⁵Lihat Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Citra Umbara: 2003.

¹⁰⁶M. Rusli karim, "Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia" dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 27.

berlangsung sepanjang hayat. Apabila demikian, maka pendidikan memegang peranan yang menentukan eksistensi dan perkembangan manusia, “karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus”¹⁰⁷

Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara dan bangsa maka pendidikan harus selalu diperbarui, diberdayakan dan dikembangkan secara sistematis, khususnya oleh para ahli pendidikan di negara ini.

Berangkat dari kerangka demikian ini, maka upaya pendidikan suatu bangsa berkaitan erat dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang, sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak mau pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan. Tuntutan pembaruan pendidikan menjadi suatu keharusan dan pembaruan pendidikan selalu mengikuti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber daya pengelola pendidikan.

Gagasan pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, seperti yang dikemukakan di atas, sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan gagasan modernisasi Islam di kawasan ini. Apabila mencermati gagasan modernisasi Islam pada awal abad 20 pada aspek atau lapangan pendidikan, direalisasikan dengan

¹⁰⁷ *Ibid, hlm. 11.*

pembentukan lembaga-lembaga modern yang diadopsi dari sistem pendidikan kolonial Belanda dan kehadiran organisasi-organisasi modernis Islam seperti Jami'at Khair, al-Irsyad, Muhammadiyah dan lain-lain. Sebagai pelopor modernis, walaupun pada awal perkembangan organisasi-organisasi ini mengadopsi sistem dan lembaga pendidikan modern secara hampir menyeluruh, artinya titik tolak modernisme pendidikan Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern (Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional.¹⁰⁸

Mencermati pembaruan pendidikan di atas, maka pembaruan pendidikan merupakan suatu usaha atau proses multidimensional yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru.¹⁰⁹

Upaya pembaruan pendidikan tidak akan memiliki ujung akhir, karena persoalan pendidikan akan selalu ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri masih ada, terlebih dalam era informasi seperti dewasa ini.

Pembaruan pendidikan terjadi karena adanya tantangan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan pendidikan itu sendiri diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan masyarakat tersebut, sehingga dapat dikatakan pendidikan lebih bersifat konservatif. Misalnya pada masyarakat agraris pendidikan didesain agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut, begitu juga apabila perubahan masyarakat menjadi

¹⁰⁸Azyumardi Azra, *Pendidikan...*, hlm. 57.

¹⁰⁹Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 65.

masyarakat industrial dan informasi, pendidikan juga didesain mengikuti irama perkembangan masyarakat industri dan informasi, demikian seterusnya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran tersebut di atas berkaitan dengan pendidikan, karenanya pembaruan pendidikan kini menjadi usaha yang harus segera dilakukan, jika pendidikan di Indonesia tidak menginginkan ketertinggalan dengan perkembangan zaman dan tersisih dari pentas global.

B. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam

Sumber-sumber sejarah tentang islamisasi di Nusantara ini sangat sedikit, secara keseluruhan catatan-catatan sejarah tentang pengislaman di dalam literatur dan tradisi melayu kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh Karena itu, banyak hal yang sukar terpecahkan sehingga sejarah pendidikan Islam di Nusantara banyak yang bersifat perkiraan. Seperti dikatakan sejarawan Indonesia, Mahmud Yunus, bahwa belum ada suatu buku yang meriwayatkan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, sedangkan sejarah islam di Indonesia pada umumnya belum dikupas dan dibahas menurut semestinya, sehingga menjadi buku sejarah Islam yang dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁰

Namun demikian, dari sekian perkiraan, kebanyakan menetapkan dan sepakat bahwa kontak Indonesia dengan Islam terjadi sejak abad ke-7 M / 1H. Meski adapula yang menyangsikan bahkan membantah, seperti kalangan arkeolog.¹¹¹

¹¹⁰Lihat Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995), Cet. 4, hlm. 6.

Perluasan Islam baru terjadi abad ke-13 M, yang ditandai berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, seperti kerajaan Perlak dan Samudera Pasai di Aceh pada tahun 1292 dan tahun 1297. Melalui pusat-pusat perdagangan di daerah pantai Sumatera Utara dan melalui urat nadi perdagangan di Malaka, agama Islam kemudian menyebar ke Pulau Jawa dan seterusnya sampai ke Indonesia Timur.¹¹²

Sukses dan cepatnya perkembangan Islam dipengaruhi antara lain faktor ajaran tentang ketauhidan –yang berkonsekuensi keadilan dan persamaan derajat manusia dalam hubungan sosial, dan faktor fleksibilitas ajaran Islam. Faktor-faktor tersebut memunculkan proses pembentukan dan pengembangan masyarakat Islam yang pertama, yang melalui berbagai macam corak, seperti jual beli, perkawinan, dan dakwah langsung serta sebagainya, baik individu maupun kolektif.

Dari situ pula semacam proses pendidikan dan pengajaran Islam dimulai di Indonesia, pendidikan Islam pada mulanya dalam bentuk sangat sederhana.¹¹³ Materi yang pertama kali diajarkan adalah *syahada*. Sebab barang siapa yang sudah bersyahadat berarti orang itu telah menjadi Islam. Para penganjur Islam –yang

¹¹¹Kalangan arkeolog tidak dapat begitu saja menerima tesis para sejarawan tentang Islam yang telah ada kontak dengan masyarakat Indonesia sejak abad ke-7 M, berdasarkan data arkeologi yang mereka temukan, menurut mereka Islam masuk ke Indonesia kurang lebih abad ke-13 M. Baca Hasan Muarif Ambary, *Menemukan Perdaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 55.

¹¹²Mengenai masuknya Islam ke Indonesia, sejak zaman pra sejarah, penduduk di bumi Nusantara ini dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sehingga pada awal abad Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Nusantara dengan berbagai daratan Asia Tenggara. Wilayah Barat Nusantara dan sekitar Malaka adalah penghasil bumi yang menjadi titik perhatian para pedagang dan menjadi jalur penting Cina dan India. Pedagang Muslim Arab, Persia dan India ada yang samapi ke pulau-pulau Nusantara untuk berdagang sejak abad ke-7 M (abad 1 H) ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah. Dari hubungan perdagangan dan pelayaran ini Islam masuk ke Indonesia. Lihat Fatah Syukur NC, *Dinamika Madrasah dalam Masyarakat Industri*, (Semarang : al-Qalam Press Semarang , 2004), hlm. 22-23.

¹¹³Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

mula-mula mengembangkan agama Islam (pendidikan Islam), melakukan pendidikan Islam secara berangsur-angsur dan mudah, sedikit demi sedikit. Pendeknya bila seseorang mengucapkan syahadat, mengakui rukun iman dan Islam, telah dianggap seorang Muslim. Kemudian setelah itu barulah diperkenalkan bagaimana cara-cara melaksanakan shalat lima waktu, membaca al-Qur'an dan seterusnya.

Sejak awal pendidikan telah mendapat prioritas utama bagi masyarakat Muslim, didorong kepentingan islamisasi yang telah mengarahkan umat Islam untuk melaksanakan pengajaran Islam sekalipun dalam sistem sederhana seperti *halaqah* yang dilakukan di tempat-tempat ibadah; masjid, mushalla bahkan di rumah ulama.¹¹⁴ Islamisasi tersebut, juga mendorong untuk mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada saat itu ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Di Jawa umat Islam mentransfer lembaga keagamaan Hindhu Budha menjadi Pesantren,¹¹⁵ di Minangkabau mengambil alih *surau* sebagai peninggalan adat masyarakat setempat menjadi lembaga pendidikan Islam, dan di Aceh mentransfer *meunasah* dan *dayah* sebagai lembaga pendidikan

¹¹⁴Ulama, di Jawa disebut dengan panggilan Kyai, di Minangkabau disebut dengan Abuya atau Inyik, di Aceh disebut dengan Tengku. Lihat Haidar Putra Daulay, *Historisitas, dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hlm. 1.

¹¹⁵Pesantren berasal dari masa sebelum Islam serta mempunyai kesamaan dengan Budha dalam bentuk asrama. Ia memberi alasan, karena sekarang dianggap pasti bahwa Islam telah masuk ke wilayah kepulauan di Asia Tenggara jauh lebih dini daripada perkiraan semula, yaitu sudah sejak pertengahan abad ke-9, tampaknya masuk akal, bahwa pendidikan agama yang melembaga berabad-abad berkembang secara paralel. Pendapat tentang Islam masuk ke wilayah Asia Tenggara sejak pertengahan abad ke-9 tersebut, didukung data sejarah, sebagaimana dikutip Hasan Muarif Ambary kapal-kapal dagang Arab sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad Masehi. Dari literatur-literatur Arab terdapat berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara, meski Ambary meragukan validitas literatur ini, tapi diakhir tulisannya yang membahas hal tersebut, memberi kata akhir sebagaimana Junus Djamil tentang *Kitab Idharulhaq*, bahwa kitab tersebut berangka tahun 225 H/840 A. D. , yang memberi petunjuk bahwa telah hadir kesultanan Islam di Sumatera pada Abad ke- 3-5 H/ 9-11 M. Lihat Hasan Muarif Ambary..., hlm. 55-56.

Islam. Sebagaimana pernyataan Haidar Putra Daulay, pendidikan Islam pada mulanya berlangsung secara tradisional, dilaksanakan di Surau, Masjid, Meunasah, Rangkang, Dayah, ataupun Pesantren. Pendidikan di tempat tersebut dipimpin langsung oleh ulama.¹¹⁶

Yang berkembang dan banyak memberi corak pendidikan Islam di Indonesia kemudian, adalah Pesantren.¹¹⁷ Menurut Zamakhsyari Dhofier, istilah pesantren berasal dari kata *santri*, dengan awalan *pe-* dan akhiran *-an*, berarti tempat tinggal santri.¹¹⁸

Pesantren telah ada pada abad ke-15 yang didirikan di antaranya oleh Walisongo di samping ulama lainnya, meskipun banyak yang menilai tidak ada bukti-bukti kapan pesantren pertama muncul atau dirikan. Namun, akar dan embrio pesantren seperti ditulis Abdurrahman Mas'ud, bisa dilacak sejak periode Walisongo.¹¹⁹ Pada mulanya sistem (dalam pengertian sederhana) pendidikan masa Walisongo –yang dapat disebut unsur-unsur pesantren saat itu, adalah Masjid, Asrama dan Santri serta Kiai.

Di Minangkabau lembaga pendidikan Islam seperti Pesantren disebut *Surau*, dan di Aceh disebut *Dayah* atau Madrasah, dan *Meunasah*.¹²⁰ Tempat-

¹¹⁶Haidar Putra Daulay, *Historisitas....*, hlm. 1.

¹¹⁷Fatah Syukur NC bahkan memasukkan sub dari sub judul Bab II dengan tema Pesantren sebagai akar pendidikan Islam di Indonesia. Ia menegaskan pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, dan merupakan akar berdirinya madrasah yang mewarisi beberapa nilai budaya yang telah berkembang di pesantren. Fatah Syukur NC..., hlm. 26 dan 32.

¹¹⁸Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 1994), Cet. 6, hlm. 18.

¹¹⁹Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren,; Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 77.

¹²⁰Keterangan lebih banyak dan lengkap tentang lembaga-lembaga tersebut dapat dilihat dalam Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), hlm. 88.

tempat itu pada mulanya ada yang berfungsi sebagai tempat berkumpul atau rapat (*surau*), sebagai tempat ibadah di setiap kampung (*meunasah*), dan sebagai tempat belajar dan shalat berjama'ah (*dayah*). Dayah dan meunasah ini dibedakan hanya oleh materi belajar yang disajikan di dayah lebih tinggi. Kesemuanya mengalami proses Islamisasi.

Lembaga-lembaga pendidikan tersebut merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang vital di Indonesia. Lembaga seperti inilah yang sangat berarti untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Melalui lembaga tersebut Islam mengakar kuat di Nusantara, sampai akhirnya datang kolonialisme yang membawa jargon *westernisasi*, *modernisasi*, sekaligus *kolonialisasi*. Di mana tidak lama implikasi yang nyata dari 'makhluk' berbahaya ini adalah terhapusnya beberapa lembaga pendidikan Islam. Dan tinggal yang eksis adalah pesantren.

Pesantren kuat dan eksis tidak lebih didukung oleh fungsi pesantren saat itu. Yaitu di masa sebelum datang kolonialisme pesantren selain sebagai tempat pendidikan keagamaan, juga menjadi semacam 'balai pendeta', tempat para Sultan berkonsultasi kepada para Wali mengenai urusan pribadi maupun kenegaraan, sehingga pesantren memiliki posisi kuat. Sedangkan pada masa penjajahan kolonial kondisi pesantren menjadi oposisi utama di mana ia menjadi pilar pergerakan perlawanan umat Islam terhadap penjajah.

Di pesantren pendidikan diorientasikan pada ikhtiar menguasai ilmu-ilmu agama yang dipegang kuat, bahkan merupakan ciri khas pesantren, yang akan merubah status pesantren jika dipelajari pula ilmu pengetahuan umum, yakni bukan

lagi pesantren tradisional.¹²¹

Arifin lebih spesifik membagi tujuan pesantren menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum membimbing anak didik menjadi manusia bekepribadian Islami yang dengan ilmu agamanya sanggup menjadi muballigh. Tujuan khususnya mempersiapkan santri menjadi orang alim agama dan mengamalkannya.¹²²

Pada masa pertumbuhan selain pesantren dan lembaga pendidikan Islam yang di sebut di atas, ada juga pendidikan Islam yang lebih bersifat non-formal. Pendidikan seperti ini dapat disebutkan pengajian; dalam rangka haul ulama, halal bi halal, hari besar Islam dan sebagainya, ada jam'iyah; seperti jam'iyah tahlil, yasinan, perzanjain dan sebagainya. Pendidikan yang bersifat non formal ini termasuk pendidikan Islam, yang di dalamnya terkandung tujuan hampir sama dengan lembaga pendidikan Islam formal, dan tidak memiliki sistem pendidikan yang jelas. Dalam penelitian ini peneliti tidak bermaksud membicarakan pendidikan Islam yang non formal ini.

Harun Nasution membagi periodisasi perkembangan pendidikan Islam menjadi zaman pembinaan, keemasan, kemunduran dan pembaruan.¹²³ Hasan Langgulung kemudian merumuskan ciri khas dalam kaitan dengan pendidikan Islam pada masa-masa tersebut. Masa pembinaan; masa nabi sampai penghujung kekuasaan Bani Umayyah yang ditandai dengan konsentrasi pendidikan dalam

¹²¹Hasbullah, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 23.

¹²²M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1991), hlm.248.

¹²³Harun Nasution, *Pembaruan dalam Islam...*, hlm. 8.

bidang baca tulis, komunikasi untuk kepentingan peneguhan dasar-dasar Islam. Masa keemasan dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah sampai runtuhnya Bagdad dan Cordoba yang ditandai dengan orientasi pendidikan yang memasukkan ilmu-ilmu akal dan pembinaan sistem sekolah (madrasah). Masa kemunduran terhitung mulai zaman kekuasaan Turki sampai lepasnya negara-negara Arab dari kekuasaan tersebut, yang ditandai dengan kebekuan pemikiran islam, kembali mengutamakan ilmu-ilmu naqli dan masuknya pengaruh-pengaruh Barat. Masa pembaruan terhitung dari terlepasnya negara-negara Arab dari kekuasaan Turki dan berkelanjutan hingga sekarang.¹²⁴

C. Pendidikan Islam di Indonesia: Pemikiran Pembaruan

Pembaruan adalah ikhtiar memahami ajaran Islam langsung dari sumber aslinya yakni al-Qur'an dan hadist untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ikhtiar penyesuaian pemahaman ajaran Islam dengan perkembangan modern dipandang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena ajaran Islam pada prinsipnya adalah kemajuan, terbukti dengan beberapa ayat al-Alqur'an maupun hadist yang begitu kuat merangsang umat Islam agar memfungsikan akal dan mengolah alam secara fungsional untuk menyempurnakan tugas-tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Misalnya pada surat Ali Imran: 191:

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit

¹²⁴Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan; Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Al Husna Zikra, 1995), Cet. 3, hlm. 10-11.

dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (QS. Ali Imran: 191)

Ayat tersebut merupakan penyemangat bagi manusia yang berakal. Bahwa salah satu ciri khas orang yang berakal yaitu apabila ia memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan faedah. Tidak ada satu waktu dan keadaannya yang dibiarkan berlalu begitu saja kecuali diisi dan digunakannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, memikirkan keajaiban yang terdapat di dalamnya yang menggambarkan kesempurnaan alam dan kekuasaan Allah. Penciptanya.

Dalam teori modern disebutkan bahwa bumi ini berputar menurut rotasinya, sedang al-Qur’an pada sekitar abad tujuh Masehi, telah berbicara tentang hal ini dalam surat al-Naml: 88 :

“Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap ditempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Naml: 88)

Ayat tersebut juga memberikan semangat kuat bagi manusia untuk melakukan pencarian pengetahuan atau pembaruan-pembaruan tentang pengetahuannya. Ayat ini menurut pendapat ulama ahli falak, menjelaskan bahwa ayat ini hubungannya bukan dengan peristiwa hari kiamat akan tetapi dengan suasana sekarang. Manusia menyangka gunung-gunung yang berada di atas permukaan bumi tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan, karena mengikuti peredaran bumi. Jadi ayat ini dijadikan dalil bahwa bumi berputar seperti planet-planet yang lain pada sumbunya, hanya

manusia sebagai penghuni bumi tidak merasakannya.

Dalam Islam pembaruan pendidikan dimulai akhir abad ke-18 ketika Mesir diduduki Napoleon dengan masuknya unsur-unsur budaya dan pendidikan modern dari dunia Barat ke dunia Islam. Seperti dapat dilihat dari gagasan Rasyid Rida memberi jalan bagi kemunduran dan kehinaan Islam melalui pendidikan yang menurutnya harus diarahkan pada semangat jihad dan ijtihad serta kembali pada al-Qur'an dan sunnah. Kata jihad ia maknai dinamika, yaitu berusaha keras mewujudkan kebangkitan kembali Islam melawan segala penindasan dan kebodohan.¹²⁵ Rasyid Ridla menekankan pada perlunya pemurnian ajaran-ajaran al-Qur'an dan sunnah melalui ijtihad dan reinterpretasi.

Secara terorganisir kokoh, pembaruan pendidikan Islam terjadi abad ke-20.¹²⁶ Pada abad ini dunia Islam termasuk Indonesia telah dimasuki semangat pembaruan dan pencerahan. Yaitu banyaknya orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan studi ke-Islaman. Muncul gagasan mendirikan madrasah, seperti di Indonesia ada Madrasah Adabiyah (*Adabiyah School*) Padang tahun 1909 oleh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1916 berdiri *Madrasah School* (Sekolah Agama).¹²⁷

Secara ringkas beberapa faktor pendorong timbulnya ide-ide pembaruan di Indonesia adalah:

1. Adanya kecenderungan umat Islam untuk kembali pada al-Qur'an dan al-Hadits

¹²⁵Muhaimin, *Pembaruan Islam; Refleksi Pemikiran Rasyid Ridla dan Tokoh-Tokoh Muhammadiyah*, (Cirebon: Pustaka Dinamika, 2000), hlm. 65.

¹²⁶Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam...*, hlm. 78.

¹²⁷Lihat Haidar Putra Daulay, *Historisitas...*, hlm. 3.

dalam rangka menolak taklid.

2. Timbulnya dorongan perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.
3. Usaha yang kuat dari orang-orang Islam untuk memperkuat organisasinya di bidang sosial ekonomi.
4. Dan dorongan yang berasal dari pembaruan pendidikan Islam. Karena cukup banyak orang dan organisasi Islam tidak puas dengan metode tradisional dalam mempelajari al-Qur'an dan studi agama. Pribadi-pribadi dan organisasi Islam pada awal abad 20 berusaha memperbaiki pendidikan Islam baik dari segi metode maupun isi.¹²⁸

Di samping faktor-faktor tersebut, khusus yang berkaitan dengan munculnya pembaruan dalam bidang pendidikan Islam adalah: *Pertama*, pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah banyak kembali ke Indonesia pelajar dari Timur Tengah seperti Kairo dan Mekkah.

Kedua, ingin mencontoh sistem pendidikan Belanda, alasannya sistem pendidikan Belanda pada saat itu jauh lebih maju dari sistem pendidikan Islam. Yaitu telah memakai sistem klasikal dengan sarana dan prasarana pengajaran dan metode yang modern.

Stenbrink pernah meneliti pendidikan Islam di Indonesia dan menunjukkan pendidikan kolonial sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, baik dari metode, dan lebih khusus dari isi dan

¹²⁸Karel A, Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah Pendidikan Islam dalam KurunModern*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 27-28.

tujuannya. Pendidikan kolonial khususnya berpusat pada pengetahuan dan ketrampilan duniawi yaitu pendidikan umum. Sedangkan lembaga pendidikan Islam tradisional ditekankan pada pengetahuan dan ketrampilan berguna bagi penghayatan agama.¹²⁹

Dari hal-hal tersebut pemikiran pembaruan pendidikan Islam pun mulai mewarnai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Oleh Muhaimin pengembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia di bagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Indonesia merdeka (1900-menjelang 1945) dan periode Indonesia merdeka (1945-sekarang). Ia memberikan periodisasi seperti itu berdasarkan atas asumsi bahwa diskursus pengembangan pendidikan Islam pada periode sebelum Indonesia merdeka pada dasarnya lebih ditujukan pada ikhtiar menghadapi pendidikan kolonial, sedangkan pada periode Indonesia merdeka diarahkan pada ikhtiar integrasi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional.¹³⁰

1. Pendidikan Islam Sebelum Merdeka (1900-menjelang 1945)

Dari masing-masing periode tersebut diduga muncul berbagai *problem* dan isu-isu pendidikan Islam yang menonjol, yang pada gilirannya menjadi diskursus bagi pengembangan pendidikan Islam terutama di kalangan para pemikir, pengembang dan pengelola pendidikan Islam di Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya.

¹²⁹*Ibid.*, hlm. 24.

¹³⁰Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: PSAPM, 2003), hlm. 69.

Awal abad 20 M pendidikan Islam di Indonesia terpecah menjadi dua golongan, yaitu: pendidikan yang diberikan sekolah-sekolah Barat yang sekuler yang tak mengenal ajaran agama; dan pendidikan yang diberikan oleh corak lama, yaitu pondok pesantren yang hanya mengenal ajaran agama saja.

Masing-masing corak tersebut memiliki ciri-cirinya masing-masing. Pada corak lama (pondok pesantren) pendidikan ditunjukkan pada menyiapkan calon kiai atau ulama yang *qualified* dalam agama dan tidak diberikan pengetahuan ilmu keterampilan sebagai bekal perjuangan mempertahankan hidup serta tidak diberikan pengetahuan umum sama sekali.

Menurut Mahmud Yunus, bahwa pada masa perubahan (1900-1908) - di mana pesantren telah ada dan menjadi salah satu sarana dan media pendidikan, materi yang diajarkan pada pondok pesantren adalah meliputi: pengajaran al-Qur'an, pengajian kitab kuning yang bertingkat; nahwu, sharaf dan fiqh dengan memakai kitab *Ajurniyah*, *matan bina*, *fathul qarib* dan sebagainya.¹³¹

Pengetahuan yang dikembangkan lebih menekankan *given perennial knowledge*, yakni pengetahuan abadi yang diwahyukan, yang berdasarkan pada wahyu Ilahi yang tertuang dalam al-Qur'an dan sunnah dan semua pengetahuan yang berasal dari keduanya dengan penekanan pada bahasa Arab sebagai kunci untuk memahami keduanya. Memilih sikap non kooperasi total dari segala yang dari Barat dan lebih memilih sikap mengisolasi diri dan juga karena dihalangi Belanda aliran kebangkitan Islam tidak leluasa berkembang.

¹³¹Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 54.

Fungsi pendidikan Islam dalam corak lama ini adalah melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai Ilahi dan insani yang terkandung dalam karya-karya klasik. Dengan hakekat tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya penguasaan ilmu agama Islam sebagaimana tertuang dalam karya klasik dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum disifati adalah sebagai rencana pelajaran yang tertuang dalam kitab produk ulama terdahulu. Yang karenanya evaluasi juga diarahkan pada penilaian terhadap kemampuan peserta didik atau santri pada kitab-kitab yang dipelajari untuk selanjutnya meningkat dalam kitab atau buku materi pelajaran yang baru yang sebelumnya telah ditetapkan oleh kiai.

Sedangkan pada corak kedua (sekuler) memiliki ciri hanya menonjolkan intelek dan melahirkan golongan intelek yang bersikap negatif terhadap Islam, dan teralienasi dari alam pikiran bangsanya. Kemudian lahir golongan *intelegensia* Barat yang disebut intelek dan golongan *intelegensia* pesantren yang disebut ulama dalam arti sempit. Pendidikan sekuler ini bertitik tolak dari nilai-nilai insani semata-mata (antroposentris). Dalam perkembangannya, segala materi-materi yang diajarkan mengesampingkan sama sekali nilai-nilai Ilahiah, karenanya sangat bertentangan dengan pendidikan pesantren yang pertama tersebut di atas. Di mana pada pesantren nilai-nilai ilahiah sedemikian rupa sangat dijunjung tinggi (teosentris).

Dengan demikian dunia pendidikan di Indonesia terdiktomi menjadi dua corak yang sangat berbeda, dan tentunya tidak akan menguntungkan

perkembangan masyarakat Indonesia yang akan datang, bahkan merugikan masyarakat Muslim sendiri. Hal demikian perlu dihilangkan atau setidaknya setidaknya dikurangi dan usaha yang banyak dilakukan pada saat itu mendirikan tempat-tempat pendidikan yang mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum bersama-sama; memberikan tambahan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum yang sekuler. Tujuannya adalah melahirkan ulama-intelekt, yaitu seorang yang pandai dalam ilmu pengetahuan umum tetapi juga mengerti soal-soal agama.¹³²

Dapat dikatakan dari dua corak yang berbeda tersebut, telah memunculkan corak “*sintesa*” yang merupakan sintesa dari corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (sekuler). Corak sintesa ini berusaha memasukkan pendidikan umum pada sekolah agama dan memasukkan pendidikan agama pada sekolah umum dan corak ini merupakan kelompok yang tidak sepakat dengan corak kedua pendidikan yang ada sebagai respon.

Dalam kajian historis corak sintesa ini muncul bersamaan lahirnya madrasah-madrasah yang berkelas yang muncul sejak tahun 1909.¹³³ Yaitu ketika pendidikan Islam mula-mula berkelas dan memakai bangku, meja dan papan tulis, yaitu Sekolah Adabiyah/Madrasah Adabiyah (*Adabiyah School*) di Padang yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad tahun 1909¹³⁴. Corak pendidikannya sangat dipengaruhi oleh pemikir-pemikir pembaruan dari Timur Tengah di mana guru-guru dari Tunisia dan Siria banyak didatangkan, termasuk

¹³²Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 71.

¹³³Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan...*, hlm. 63.

¹³⁴*Ibid.*, hlm. 55.

juga empat orang guru berbangsa Belanda.¹³⁵

Tokoh yang memiliki pola pemikiran hampir sama dengan kegiatan Abdullah Ahmad adalah KH. Ahmad Dahlan (1868-1923). Ia mendirikan organisasi Muhammadiyah pada 18 November 1912 di Yogyakarta. Dalam membentuk kader dan guru-guru agama, ia mendirikan pondok Muhammadiyah seperti Normal Islam di Padang pada tahun 1931.¹³⁶

Yang membedakan pondok Muhammadiyah dengan pondok Pesantren lain, adalah digunakannya sistem penyelenggaraan pendidikan modern. Perbedaan ini dapat dilihat dari aspek, yaitu tidak lagi menggunakan sorogan dan weton dalam cara mengajar karena dianggap tidak efisien, dan menggunakan sistem klasikal seperti model Barat yang lebih efisien.

Bahan pelajaran selain agama juga memasukkan pula ilmu pengetahuan umum dan kitab-kitab modern. Berbeda dengan pesantren lama, di pondok Muhammadiyah ini rencana pelajaran diatur sedemikian rupa sehingga efisien belajar terjamin. Pendidikan diselenggarakan dalam asrama yang dipimpin secara teratur. Pengajar ada pula yang bercorak pikiran modern. Hubungan guru-murid tidaklah otoriter tapi ada suasana lebih akrab dan bebas demokratis.

Adapun format pembaruan Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, tercermin dari ide dasar yang merupakan cita-cita penyelenggaraan pendidikan, seperti dituturkan pendirinya yaitu konsepsi kiai-intelekk dan intelek-kiai, artinya jadilah ulama yang berpikir maju, dan jangan berhenti untuk kepentingan

¹³⁵Karel A, Steenbrink, *Pesantren, Madrasah...*, hlm. 39.

¹³⁶*Ibid.*, hlm. 55-56.

Muhammadiyah. Konsep ini mengandung maksud bahwa pendidikan diarahkan dalam membentuk manusia muslim yang baik budi, alim dalam agama, luas dalam pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya.¹³⁷

Inti dari materi-materi atau kurikulumnya mencakup tiga aspek, yaitu; pendidikan moral berdasar al-Qur'an dan sunnah; pendidikan individu untuk menumbuhkan perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat dengan harmonis; pendidikan kemasyarakatan untuk menumbuhkan kesadaran kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat.

Selain Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyahnya, ada pula KH. Hasyim Asy'ari. Ia berperan dalam pemikiran pembaruan pendidikan Islam karena memperkenalkan pola pendidikan madrasah di lingkungan pesantren Tebu Ireng Jawa Timur. Pada awal berdirinya tahun 1899 pesantren ini menitik beratkan pada ilmu-ilmu agama dengan sistem sorogan dan bandongan. Tapi pada tahun 1919 mengalami pembaruan terutama dalam sistem pengajarannya, yakni menggunakan sistem klasikal, yang terkenal dengan sistem madrasah.

Madrasah kemudian menjadi sub sistem dari sistem pendidikan Tebu Ireng. Sebagai sentral dalam jaringan pesantren di Jawa dan terlebih setelah didirikan perkumpulan Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, maka apa yang dilakukan KH. Hasyim Asy'ari dijadikan model bagi usaha perkumpulan

¹³⁷Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 107.

tersebut dalam bidang pendidikan. Adapun ilmu-ilmu umum yang diajarkan selain ilmu agama adalah materi membaca dan menulis huruf latin, bahasa Indonesia, ilmu bumi, sejarah Indonesia dan ilmu hitung.¹³⁸

Dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pada periode sebelum Indonesia merdeka secara sederhana terdapat beberapa corak pemikiran pengembangan pendidikan Islam, yaitu;

1. *Isolatif-Tradisional*, yang tidak mau menerima segala yang berbau Barat, sehingga terhambatnya pengaruh pemikiran-pemikiran modern dalam Islam. Tampak jelas pada pendidikan pesantren tradisional yang mengedepankan pendidikan ilmu-ilmu agama tanpa pengetahuan umum sama sekali. karenanya hakekat pendidikan Islam adalah sebagai ikhtiar melestarikan dan mempertahankan khazanah-khazanah pemikiran ulama terdahulu. Tujuan pendidikan adalah menyiapkan calon-calon kiai atau ulama yang hanya menguasai agama semata.
2. *Sintesis*, yang mempertemukan antara corak lama (pondok pesantren) dan corak baru (model pendidikan kolonial atau Barat) yang berwujud sekolah atau Madrasah.

Model sintesis ini dalam realitasnya, terdapat variasi pola pendidikan Islam karena dipengaruhi pemikiran para pendirinya, yaitu; pola pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan Barat terutama dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan

¹³⁸Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 109-110.

ilmu-ilmu agama Islam seperti Madrasah Tebu Ireng dan Madrasah Sumatera Tawalib; pola pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, tetapi mata pelajaran umum secara terbatas diberikan juga seperti Madrasah Salafiyah Tebu Ireng; pola pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan-muatan keagamaan dan non keagamaan, seperti pondok Muhammadiyah; dan pola pendidikan sekolah yang mengikuti pola gubernemen dengan ditambah beberapa mata pelajaran agama, seperti Madrasah Adabiyah (*Adabiyah School*).¹³⁹

Secara sederhana pula uraian tersebut menggaris bawahi adanya beberapa corak pemikiran dan pengembangan pendidikan Islam yang sangat variatif masa sebelum Indonesia merdeka. Yang secara filosofis masing-masing corak tersebut hendak mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunah, tetapi mereka memiliki perspektif yang berbeda-beda yang berimplikasi pada rumusan-rumusan tujuan, isi dan materi pendidikan serta aspek metodologinya.

2. Pendidikan Islam Sesudah Merdeka (1945-Sekarang)

Sedangkan pemikiran pendidikan pada periode Indonesia merdeka (1945-sekarang) yang tampak dari usaha berkelanjutan dari usaha-usaha pendidikan pada masa sebelum merdeka, adalah adanya usaha untuk terjadi ikhtiar mengintegrasikan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Karena

¹³⁹Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 80-81.

sebagaimana diketahui masa awal kemerdekaan, pemerintah dan bangsa Indonesia mewarisi sistem pendidikan dan pengajaran yang dualistis, yaitu:

Pertama, sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama, yang merupakan warisan dari kolonial Belanda.

Kedua, sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri, baik yang bercorak *isolatif-tradisional* maupun yang bercorak *sintesis* dengan berbagai variasi pola pendidikannya sebagaimana uraian tersebut di atas.

Wacana pemikiran pembaruan yang berkembang dalam ikhtiar terwujudnya integrasi pendidikan Islam ke dalam pendidikan nasional adalah menyoroti permasalahan seputar dikotomi ilmu pengetahuan hingga memunculkan islamisasi ilmu pengetahuan (pendidikan), kualitas pendidikan agama Islam di sekolah, upaya pendidikan Islam secara utuh dalam mewujudkan manusia yang utuh serta penggalian konsep pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam mulai periode klasik hingga periode modern dan baik dari dalam maupun luar negeri.¹⁴⁰

Pada persoalan pertama, problem dikotomi antara ilmu dan agama sebenarnya sudah muncul sejak Indonesia belum merdeka. Hal ini dapat dibaca dari antologi kecil berjudul “Pendidikan Islam di Indonesia antara Cita dan Fakta” di mana penulisnya seperti Amrullah Ahmad dengan tema “Kerangka

¹⁴⁰*Ibid.*, hlm. 82.

Dasar Masalah Paradigma Pendidikan Islam”, Ahmad Watik Pratiknya dengan tema “Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia”, dan Ahmad Syafi’i Maarif dengan tema “Pemikiran tentang Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia”,¹⁴¹ di mana semuanya secara serius berbicara seputar masalah klasik pendidikan Islam yang tetap actual dalam pemikiran pendidikan Islam yaitu persoalan dikotomi.

Bersamaan dengan persoalan dikotomi ini muncul gagasan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon dari krisis pendidikan dan ilmu pengetahuan. Syed M. Naquib Al-Attas tokoh besar pembaruan Islam yang lahir di Indonesia ini adalah penemu konsep kontemporer tersebut.¹⁴² Al-Attas mencanangkan pendekatan integral terhadap berbagai pendekatan dalam dikotomi yang dianggapnya selama ini dikotomik seperti pendekatan tekstual-kontekstual, historis-normatif yang menunjukkan kerancuan melalui konsepnya mengenai pandangan hidup Islam.¹⁴³ Tokoh cendekiawan muslim Indonesia yang concern dalam persoalan tersebut adalah dapat disebut AM. Saefudiin dalam tulisannya yang diterbitkan oleh UIKA Bogor yaitu “*Perspektif Ilmu Pengetahuan dan Kampus yang Islami*”.

Sikap umum cendekiawan Indonesia pada islamisasi pengetahuan terjadi pro dan kontra. Bagi yang pro karena umat Islam membutuhkan sebuah sistem sains untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material padahal sistem sains

¹⁴¹Dapat dibaca dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

¹⁴²Syed Muhammad Naquib, *Filsafat Pendidikan dan Praktik Pendidikan Islam Syed Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 45.

¹⁴³*Ibid.*, hlm. 19

yang ada banyak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Bahwa kenyataan sains modern memunculkan ancaman bagi kehidupan dan lingkungan, serta perlunya umat Islam memiliki peradaban baru, yakni sains berdasar nilai-nilai Islam.

Bagi yang kontra bahwa kemajuan sains dan teknologi Barat terilhami dan ditransformasi pada dan oleh masa keemasan Islam, karena itu dibutuhkan transformasi ilmu dari Barat secara besar-besaran dan tak perlu waspada karena ilmu adalah netral, sehingga islamisasi ilmu pengetahuan tidak begitu penting. Yang terpenting justru islamisasi subjek pembawa dan pengembang iptek. Namun pada dasarnya keduanya sama, yaitu mengharapkan terbangunnya peradaban yang islami.

Persoalan kedua yaitu menyangkut kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum, hal ini adalah menyangkut problem internal dan eksternal. Persoalan internal yaitu *concern*-nya isi dan orientasi pendidikan agama pada persoalan teoritis keagamaan yang kognitif dan ibadah praktis, tapi tidak *concern* pada bagaimana hal itu menjadi makna dan nilai. Yang eksternal adalah kemajuan iptek yang memunculkan *scientific criticism* atau kritik ilmu pengetahuan terhadap penjelasan keagamaan, serta kemajemukan masyarakat beragama yang belum siap berbeda faham dan justru apologis, fanatik dan absolut serta *truth claim*¹⁴⁴.

Persoalan ketiga adalah membangun pendidikan Islam secara utuh untuk mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini, Karim

¹⁴⁴Untuk memperdalam tentang hal tersebut dapat dibaca karya Amin Abdullah, "Problem Epistemologis-Metodologis", dalam Abdul Munir Mul Khan, et. al., *Religiusitas Iptek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

menyatakan bahwa “pendidikan Islam di beberapa negara Islam –yang mayoritas penduduknya Islam termasuk Indonesia- tidak lebih dari duplikasi terhadap pendidikan di negara-negara Barat sekuler yang banyak mereka cela. Dengan demikian produk sistem pendidikan mereka tidak mungkin menjadi alternatif. Karena itu tantangan yang mendasar bagi pendidikan Islam saat ini adalah mencari sistem pendidikan alternatif sebagai sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada”.¹⁴⁵ Sistem pendidikan yang dikehendaki adalah sintesa dari berbagai sistem yang pernah ada, dan menumbangkan konsep dualisme dikotomi merubah menjadi yang integrative serta mengupayakan pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam.¹⁴⁶

Namun demikian dari beberapa persoalan itu, pada pokoknya terhadap usaha integrasi ini terdapat pihak yang kontra dan setuju. Dan dari segi filosofisnya yang kontra dan setuju itu lebih didasari perasaan kekhawatiran bahwa apakah integrasi itu tidak menyebabkan pendidikan Islam akan kehilangan identitasnya, ataukah justru sebaliknya.¹⁴⁷ Karena itu jawaban terhadap persoalan ini kiranya perlu pula digunakan pendekatan filosofis. Dengan kerangka pemikiran seperti ditulis oleh Muhaimin dan Abdul Mujib:

“Kalau kita memahami pendidikan Islam hanya sebatas pada sisi

¹⁴⁵M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Ikhtiar Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), hlm. 37.

¹⁴⁶Dalam memecahkan masalah format integrasi pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam, Syafi’i Maarif menawarkan landasan filosofis pendidikan yang sepenuhnya berangkat dari cita-cita al-Qur’an tentang manusia, serta perlunya pendidikan di bumi yang berorientasi ke langit (*orientasi transcendental*), yang harus tercermin secara tajam dan jelas dalam rumusan filsafat pendidikan Islam, agar kegiatan pendidikan mempunyai makna spiritual dan mengatasi ruang dan waktu. *Ibid.*, hlm. 147-155.

¹⁴⁷Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam; Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: PT. Trigenda Karya, 1993), hlm. 5.

kelembagaannya atau berpikir simbol, identitas itu kemungkinan akan hilang (identitas keislaman) bila dianggap kurang relevan dan kurang selaras dengan perubahan sosio-budaya dan pemikiran umat Islam yang semakin dinamis. Akan tetapi, bila kita memahami pendidikan Islam dalam kerangka ajaran Islam yang universal dan kosmopolit, sebenarnya, kekhawatiran hilang identitas itu tidak perlu terjadi.”¹⁴⁸

Pernyataan tersebut seperti ada pembuktiannya jika melihat pada kajian historis yang pernah ada di Indonesia. Yaitu bahwa jika dilihat secara historis timbulnya kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia, adalah antara lain merupakan reaksi terhadap dominasi pendidikan kolonial yang sekuler.

Reaksi itu memunculkan ide, penyelenggaraan pendidikan Islam, sehingga timbul pesantren, madrasah, dan sebagainya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah menyusun satu sistem pendidikan nasional, sehingga pendidikan Islam (dalam pengertian di atas) dipandang sebagai sub sistem pendidikan nasional yang diakui eksistensinya. Berarti dalam historis telah memberikan fakta yang menegaskan tidak perlu adanya kekhawatiran integrasi ini.

D. Kerangka Konseptual Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia

1. Posisi Pendidikan Islam dalam Sisdiknas

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan.

¹⁴⁸*Ibid.*

Hal ini diakui bahwa “keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan”.¹⁴⁹ Artinya keberhasilan tersebut akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan.

Untuk itu secara *yuridis formal*, Negara mengamanatkan kepada pemerintah “untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.¹⁵⁰ Tentunya disadari, bahwa sektor utama dan pertama yang mendapat prioritas dalam pembangunan bangsa adalah sektor pendidikan yang aksentuasinya pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional (UU Nomor 20 tahun 2003) yaitu:

*“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*¹⁵¹

¹⁴⁹Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaruan dan Pambudayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia*, (Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2002). hlm. 24.

¹⁵⁰ *Undang-Undang Dasar 1945 RI, dan Amandemen Tahun 2002, Bab XIII, Pasal 31, Ayat: 3*, (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm. 30.

¹⁵¹ *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 3*. (Bandung: Fokus Media, 2003), Cet. II, hlm. 6.

Peningkatan keimanan dan ketakwaan akan lebih efektif, manakala dioptimalkan melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui jalur kelembagaan pendidikan Islam, maupun melalui proses pembelajaran bidang studi (pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum), sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Sebab pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya.

Kejelasan terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri peserta didik secara berimbang, baik aspek spiritual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kepribadian.¹⁵² Dengan kata lain penyelenggaraan sistem pendidikan Islam dilakukan dengan secara sadar dan sistematis serta terarah pada kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (*iptek*), dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (*imtaq*).¹⁵³ Dengan demikian tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan akan terwujud, sebab secara praktis nilai-nilai dasar sistem pendidikan nasional pada hakekatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu sistem pendidikan Islam harus dioptimalkan, agar sistem pendidikan nasional terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.

Dalam realitasnya, justru pendidikan Islam belum responsif terhadap tuntutan hidup manusia dan masih menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalannya dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang belum meraih

¹⁵²Hasbullah, *Kapita Selekta...*, hlm.6.

¹⁵³E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

keunggulan kompetitif, sehingga masih cenderung dilabelkan sebagai pendidikan ‘kelas dua’. Memang terasa janggal, dalam suatu komunitas masyarakat muslim terbesar dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia, justru pendidikan Islam tersisih dari *mainstream* sistem pendidikan nasional.¹⁵⁴

Berdasarkan pengamatan Usman Abu Bakar, bahwa persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.¹⁵⁵

Seperti jeleknya kualitas pengajaran guru dikelas, ternyata disebabkan rendahnya gaji yang diterima, dengan ini pun disebabkan rendahnya anggaran pendidikan, sedangkan rendahnya anggaran pendidikan, ternyata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting sebuah proses pendidikan bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa, dan hal ini pun disebabkan ketiadaan niat politik para elit untuk memperjuangkan peningkatan pendidikan Islam, sehingga pada gilirannya ”perhatian pemerintah yang dicurahkan terhadap pendidikan Islam sangat kecil porsinya”.¹⁵⁶

Demikian halnya dengan kurang baiknya implementasi pengajaran, ternyata disebabkan oleh tidak dipetakannya secara jelas apa yang menjadi

¹⁵⁴ H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 147.

¹⁵⁵ Usman Abu Bakar, dan Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 3.

¹⁵⁶ Artinya tanggung jawab yang diberikan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembangunan moral anak bangsa hanya dalam porsi kecil, yaitu diberikan sebagai bentuk proses pembelajaran di sekolah umum dan itupun hanya bersifat kognitif. Padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang *sosialistis religius*. Lihat Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 11.

kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ketidak jelasan visi, misi, tujuan dan strategi pendidikan Islam yang diterapkan. Ketidak jelasan ini ternyata berkolerasi dengan ketidak jelasan konsep tentang sistem pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional. Dan semua ini berhubungan erat dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional yang diberlakukan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan Islam di Indonesia dalam pergulatannya cukup mendapat berbagai tantangan, baik secara *konseptual-teoritis* maupun dalam tataran *operasional-praktis*. Adalah hal yang wajar bila timbul suatu gagasan yang begitu besar untuk merubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU. Nomor 20 tahun 1989, karena Undang-undang ini dianggap terlalu politis, sehingga mematikan daya kreasi dan kreativitas masyarakat pendidikan.¹⁵⁷

Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada harapan tersendiri, sebab secara konseptual Undang-undang ini merupakan titik balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Hal ini karena substansi Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.

¹⁵⁷Aulia Reza Bastian, *Reformasi Pendidikan...*, hlm. 24.

Namun demikian, peran dan kedudukan yang kuat tersebut sekaligus menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi pendidikan Islam, dengan diberlakukannya seiring diberlakukannya Undang-undang tersebut adalah:

Pertama, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi *center of excellence* bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah?

Kedua, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaruan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti?

Ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuhkan kembangkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. lengkap dengan kemampuan bernalar-ilmiah yang tidak mengenal batas akhir?¹⁵⁸

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas dan sekaligus mencari solusi terbaik dalam menghidupkan dan mengembangkan serta memberdayakan sistem pendidikan Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga diperlukan konsep-konsep baru yang strategis, sehingga pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis, proaktif dan antisipatif terhadap

¹⁵⁸Mastuhu, *Memberdayakan...*, hlm. 38.

perkembangan di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia global sekarang ini.¹⁵⁹ Dengan demikian pendidikan Islam tersebut akan dapat berfungsi sebagai sarana pembudayaan manusia yang bernafaskan Islam yang lebih efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menata ulang sistem pendidikan Islam sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang tersebut, adalah dengan mengubah paradigma lama ke paradigma baru, dengan merumuskan kembali konsep-konsep strategis, dan sekaligus mengembangkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam serta menyusun strateginya guna melakukan aksi yang lebih nyata.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah dasar filosofis dan sistem pendidikan Islam, termasuk muatan (*content*) kurikulum, sasaran ideal dan material, serta strategi-strategi pendekatan dan pembelajaran yang sangat tertumpu pada sarana prasarana dan kemampuan para pengelolanya (Kepala sekolah, guru dan staf-staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan), serta adanya laboratorium fungsi ganda, antara akademik dan bisnis dalam mengembangkan potensi anak didik.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 3-4.

2. Kerangka Konseptual Reformulasi Sistem Pendidikan Islam

Secara konseptual, pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yakni:

1. Pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah,
2. Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidihkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi *way of life* (pandangan dan sikap hidup) seseorang,
3. Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam.¹⁶⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat pendidikan Islam mengandung beberapa konsep dimana konsep dasarnya dapat dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari Al-Quran dan Sunnah. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Sedang *konsep praktis*, dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim pada setiap generasi sejarah umat Islam.

¹⁶⁰Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 30.

Diskursus mengenai pemahaman pendidikan Islam di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan pemahaman pendidikan pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam menurut M. Arifin, “titik beratnya terletak pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu pengetahuan luas”.¹⁶¹

Demikian juga dengan diskursus pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, tidak lepas dari pemikiran sistem pendidikan nasional, sebab pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.¹⁶²

Tentunya pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian dalam arti positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk membenahi pendidikan Islam, maka harus dilakukan upaya pembaruan dalam sistem pendidikan Islam, baik pada tataran *konseptual-teoritis*, maupun *operasional-praktis*. Sebab selama ini pendidikan Islam selalu tertinggal dari *mainstream* pendidikan nasional.

Pada dasarnya pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap setelah disyahkan dan diberlakukannya Undang-

¹⁶¹Muzayyin Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, A. Syafi'i (ed), Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.

¹⁶²H. A. R. Tilaar, *Paradigma...*, hlm. 149.

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 11 Juni 2003. Dengan Undang-Undang tersebut posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.¹⁶³

Penguohan dan pemantapan kedudukan tersebut patut disyukuri, sebab secara implisit menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, pada saat yang sama justru menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Sebab secara konseptual, Undang-Undang tersebut memberikan arah baru dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam.

Hal ini dapat dianalisis dari substansi Undang-undang tersebut, yang menekankan arti penting pendidikan Islam bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seperti dalam pasal 1, ayat: 1. memberikan definisi “pendidikan adalah... Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,....”¹⁶⁴ Demikian juga dengan pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang menekankan pada “dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak

¹⁶³Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. 57.

¹⁶⁴Artinya sendi-sendi fundamental yang mendasari kehidupan peserta didik, yaitu iman tauhid yang berdimensi ketakwaan yang monoloyal kepada Allah, akan berhasil mendorong dan memacu untuk berperan nyata dalam segala bidang kehidupan yang melahirkan sikap hidup *fastabiqul khairat* (berlomba-lomba mencari dan mengamalkan kebaikan). Lihat dalam Muzayyin Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan...*, hlm. 28.

mulia....”, dan pasal 12, ayat: 1 point a, yang memberikan hak kepada peserta didik untuk “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”,¹⁶⁵ serta dalam pasal 30, yang mengatur khusus tentang “pendidikan keagamaan”.¹⁶⁶

Dengan mencermati pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik, dan secara eksplisit menjadi peluang besar dalam menghidupkan dan memberdayakan serta mengembangkan kembali pendidikan Islam di Indonesia. Asumsi yang digunakan, *pertama*: Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam; *Kedua*, Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi Sistem Pendidikan Nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, di mana dalam konsep penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri.

Ketiga, Dalam keadaan yang stabil, baik politik, hukum, keamanan dan ekonomi, sangat terbuka kesempatan bagi kelompok mayoritas untuk mengisinya; *Keempat*, Semakin berkembangnya gerakan pembaruan pemikiran Islam,¹⁶⁷ yang pengaruhnya sangat terasa di kalangan masyarakat terpelajar.

¹⁶⁵Ketentuan pasal 12, ayat 1. a. tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama diajar oleh guru agama yang seagama, bertujuan untuk melindungi akidah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama yang dianutnya. Lihat pendapat Lukman Hakim Syaifuddin, dalam *Republika*, Senin, 12 Mei 2003.

¹⁶⁶Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

¹⁶⁷Mastuhu, *Memberdayakan...*, hlm. 41

Keempat butir peluang di atas, jika dikembangkan secara maksimal akan menjadi suatu kekuatan yang mengantarkan Pendidikan Islam di Indonesia mencapai kemajuan yang gemilang. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategis, dan antisipatif serta langkah-langkah operasional.

Beberapa ahli pendidikan, praktisi, dan cendekiawan muslim yang peduli pada kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, mencoba menawarkan paradigma dan strategi pembaruan. Sekurang-kurangnya terdapat dua aliran pemikiran yang menonjol: *Pertama*, Usaha-usaha pembaruan yang berangkat dari identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam yang bersifat eksternal, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain. *Kedua*, Usaha-usaha pembaruan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara internal, seperti rendahnya kualitas SDM, sarana dan prasarana dan sebagainya.¹⁶⁸

Kedua aliran tersebut menghasilkan pemikiran dan strategi dengan tingkat kedalaman dan efektivitas masing-masing. Aliran yang pertama memang lebih bersifat populis, karena menghasilkan gagasan-gagasan dan langkah-langkah solusi jangka pendek yang mungkin cenderung bersifat taktis, dan lebih mudah diketahui dan dirasakan. Sedangkan tren kedua akan menghasilkan konsep-konsep dan langkah-langkah jangka panjang yang strategis.

¹⁶⁸Hamid Fahmy, dkk, (ed), *Pengantar Penerjemah*, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam*, Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 16.

Aliran ini memang bersifat eksklusif karena berupa kajian konseptual dan teoritis. Namun kedua aliran tersebut tidak cukup untuk memperbaharui pembenahan pendidikan Islam di Indonesia, apabila hanya dipahami pada batas profan saja. Oleh karena itu perlu ada *aliran ketiga*, yaitu usaha-usaha pembaruan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara eksternal dan internal, sehingga tren ini akan menghasilkan gagasan-gagasan yang *konseptual-teoritis* dan sekaligus *operasional-praktis*. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam mengharuskan adanya pemahaman terhadap hakekat pendidikan Islam itu sendiri. Pemahaman tentang hakekat pendidikan Islam itulah yang kemudian diproyeksikan dalam tataran praktis.

Upaya pencarian konsep baru yang strategis dan responsif dalam dunia pendidikan Islam, tidak menutup kemungkinan melalui kombinasi antara pandangan Islam dengan pemikiran pendidikan modern sepanjang memiliki relevansi kuat dalam merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam.¹⁶⁹ Dengan demikian upaya tersebut dapat dilakukan melalui metode, antara lain: *Internalisasi, Koreksi, Edisi* (tambahan), *Substansi* dan *Feksasi* (adopsi).

Berpijak dari kerangka dasar di atas, ada beberapa alasan pokok perlunya konsep-konsep baru yang strategis dalam pembaruan pendidikan Islam di Indonesia: *Pertama Secara Ekternal:*

¹⁶⁹Azyumardi Azra, *Pendidikan...*, hlm. 90.

1. Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen pendidikan Islam;
2. Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.¹⁷⁰

Kedua Secara Internal:

1. Adanya konsepsi dan praktik pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pada pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan duniawi, hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum;¹⁷¹
2. Kurang berkembangnya konsep *humanisme religius* dalam dunia pendidikan, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “*abdullah*” daripada “*khalifatullah*” dan “*hablun minallah*” daripada “*hablun minannas*”
3. Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.¹⁷²

¹⁷⁰Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada bagian penjelasan..., hlm. 45.

¹⁷¹Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 40.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembaruan pendidikan Islam, dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara mendasar, antara lain:

1. Perlu adanya pemikiran kembali tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya yang kuat.¹⁷³
2. Adanya kejelasan cita-cita dengan langkah yang jelas di dalam usaha mewujudkan cita-cita.
3. Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya.
4. Perbaikan manajemen.
5. Peningkatan mutu sumber daya manusia.¹⁷⁴

Berdasarkan alasan-alasan dan langkah-langkah di atas, maka secara konseptual pendidikan Islam diarahkan pada pentingnya penggabungan antara *ilmu fardu ain* dengan *ilmu fardu kifayah*, yang dilihat dalam perspektif integral, yaitu ilmu fardu ain merupakan asas dan rujukan bagi ilmu fardu kifayah.¹⁷⁵ Dengan kata lain merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang *berwawasan semesta*, dengan langkah-langkah, *Pertama*, membangun kerangka

¹⁷²Abdurrahman Mas'ud, *Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 15.

¹⁷³A.Malik Fadjar, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999), hlm. 37.

¹⁷⁴A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 13.

¹⁷⁵M. Naquib Al-Attas, *Filsafat...*, hlm. 271.

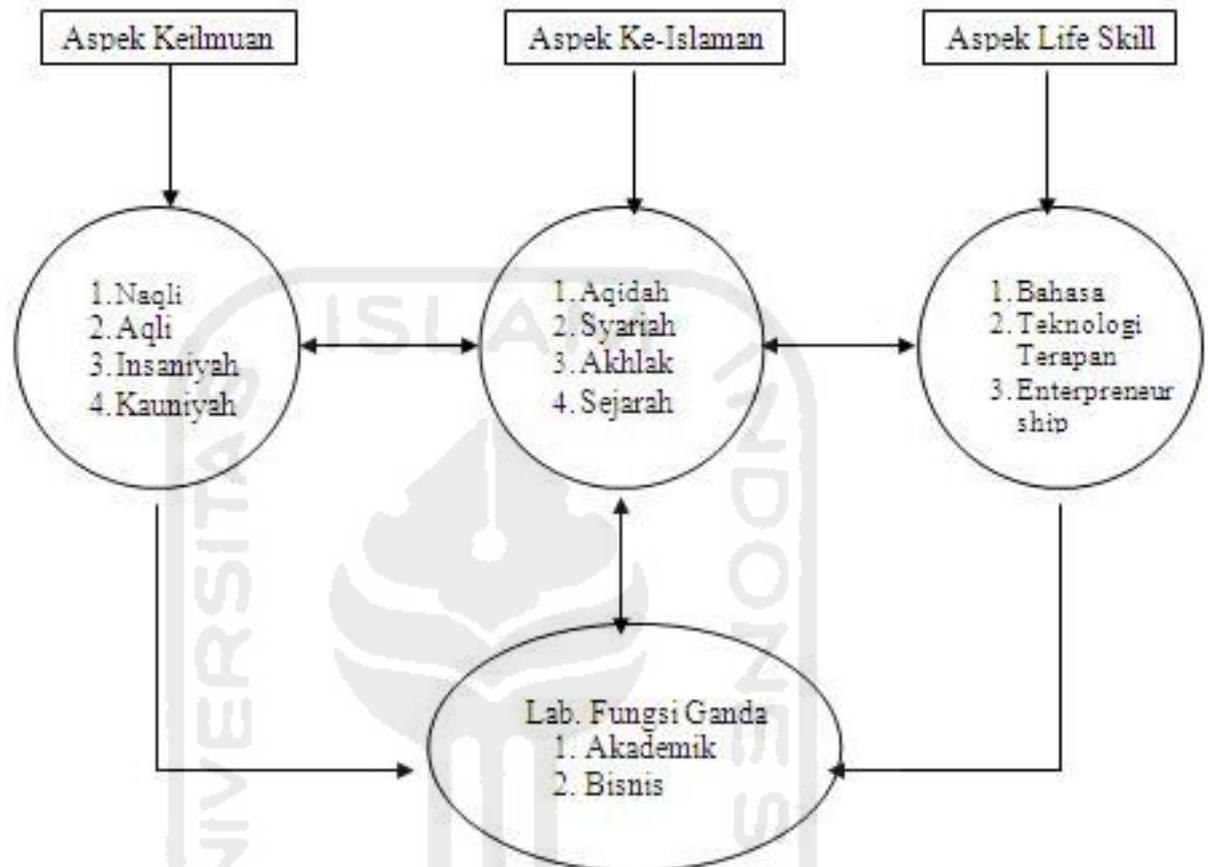
dasar filosofis dan teoritis yang didasarkan pada sumber ajaran Islam; *kedua*, membangun sistemnya yaitu:

1. merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan
2. mengembangkan kurikulum dan materi ajar pendidikan dengan prinsip diversifikasi
3. metodologi pembelajaran
4. profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan
5. mengembangkan sistem manajemen sekolah
6. pengadaan sarana dan prasarana
7. pendanaan pendidikan
8. membangun jaringan kemitraan (*network*).

Bangunan sistem pendidikan Islam ini secara *operasional-praktis* diproyeksikan melalui aktualisasi *Laboratorium fungsi Ganda*, yakni peningkatan mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

Konsep reformulasi pendidikan Islam secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini:¹⁷⁶

¹⁷⁶Usman Abu Bakar, dan Surohim, *Fungsi Ganda...*, hlm. 13.



Gambar (1): Konsep Pendidikan Islam

E. Prospek Pendidikan Islam Di Indonesia

1. Hambatan Pendidikan Islam

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi kompleks, mulai dari *konseptual-teoritis* sampai dengan *operasional-praktis*. Hal ini dapat dilihat dari keteringgalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan 'kelas dua'.

Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan umat yang lainnya.

Berkaitan dengan ini, ada beberapa fenomena yang dicatat Azyumardi Azra sehingga menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan:

- a. pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang.
- b. Sistem pendidikan Islam kebanyakannya masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika modern. Padahal ilmu ini mutlak diperlukan dalam mengembangkan teknologi canggih. Disamping itu ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam.
- c. usaha pembaruan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya.
- d. sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat *future-oriented*.

- e. sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.¹⁷⁷

Sedangkan Abdurrahman Mas'ud menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah:

- a. Dunia pendidikan Islam kini terjangkit penyakit *Simtom dikotomik*, dan masalah *spirit of inquiry*.¹⁷⁸
- b. Kurang berkembangnya konsep *humanisme religius* dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “*abdullah*” daripada “*khalifatullah*” dan “*hablun minallah*” daripada “*hablun minannas*”.
- c. Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke *the tradition of learning*.¹⁷⁹

Sementara Muhaimin menyoroti, bahwa kelemahan pendidikan Islam di Indonesia adalah karena masih adanya konsepsi dan praktek pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, hanya mengurus persoalan ritual dan

¹⁷⁷Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. 59-60.

¹⁷⁸Yang dimaksud *spirit of inquiry* adalah hilangnya semangat membaca dan meneliti yang dulu menjadi supremasi utama dunia pendidikan Islam pada zaman klasik dan pertengahan. Jangankan tradisi membaca, pembangkitan minat baca di sekolah-sekolah saat inipun menjadi ganjalan utama para guru dan tenaga perpustakaan. Lihat dalam Abdurrahman Mas'ud , *Menggagas...*, hlm. 14.

¹⁷⁹*Ibid.*, hlm. 14-15.

spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum.¹⁸⁰

Sedangkan Marwan Sarijo, menjelaskan dengan rinci kelemahan-kelemahan pendidikan Islam, antara lain:

- 1) Adanya alokasi waktu yang kurang memadai
- 2) Isi kurikulum yang terlalu sarat
- 3) Adanya sarana dan lingkungan sekolah tidak menunjang pelaksanaan pendidikan Islam
- 4) Kurang adanya kerjasama yang baik antar komponen guru
- 5) Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan
- 6) Kurang adanya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan perkembangan zaman
- 7) Kurang mampu atau tidak sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat
- 8) Kurang memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.¹⁸¹

Mencermati pendapat-pendapat di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat macam, yaitu :

¹⁸⁰Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam...*, hlm. 40.

¹⁸¹Marwan Sarijo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 66.

a) Persoalan penduduk.

Persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan Islam adalah adanya *pluralisme* umat Islam Indonesia yang tidak saling menerima perbedaan dalam cara berfikir, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga acap kali terjadi perpecahan, pertentangan bahkan mengalami *eskalasi* ketinggian yang berbahaya. Jika kondisi seperti ini masih dihidupkan ditengah-tengah umat Islam Indonesia, maka akan berimplikasi sendiri. Sebab pluralisme yang tidak sehat, akan berdampak pada kurangnya kepedulian umat terhadap perkembangan pendidikan Islam.

b) Persoalan wawasan.

Salah satu faktor penghambat pendidikan Islam adalah adanya wawasan sempit serta dikotomis dari umat Islam Indonesia dalam memandang realitas pendidikan Islam. Sebagai contoh, saat digulirkannya wacana pengembangan status IAIN/STAIN menjadi UIN telah terjadi tarik ulur pemikiran yang cukup rumit, sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra dikalangan intelektualitas muslim sendiri. Tetapi saat terjadinya penetapan/perubahan status MAN menjadi MAN Model, justru tidak terjadi pro dan kontra. Contoh ini menunjukkan adanya pemikiran yang paradok dikalangan muslim.

Begitu juga problem tentang dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum atau antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Padahal, jika disimak kembali sejarah peradaban Islam, puncak kemajuan peradaban Islam,

empat abad pertama sejak munculnya agama Islam ini (7-11 M), tidak ditemukan adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.¹⁸²

Bahkan Nurcholis Madjid, mengemukakan “karna sikap orang-orang muslim klasik yang posesif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain, maka peradaban Islam-lah yang pertama kali menyatukan khazanah ilmu pengetahuan bersama secara internasional dan kosmopolit”.¹⁸³ Hal ini pun dapat dilihat dari konsep pendidikan Ibn Hazm, yang dikutip oleh Abdurrahman Mas’ud, bisa diketahui “bahwa pendidikan Islam ternyata tidak mengenal pendikotomian antara ilmu agama disatu sisi dan sains disisi lain”.¹⁸⁴

Secara teoritis, ajaran Islam tidak memberikan tempat dan pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi yang demikian, lebih merupakan meinsterm historis, sehingga memunculkan adanya dikotomi. Hal senada dijelaskan oleh Mastuhu, bahwa hakekatnya “ilmu adalah bagian esensial dari agama, karna itu pada dasarnya pendidikan itu hanya satu, tidak ada pendidikan agama dan tidak ada pendidikan umum”. Semua pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya adalah sama, yaitu bertujuan untuk mengembangkan *human dignity*, tidak peduli apapun suku dan agama peserta didik. Agama merupakan sumber dasar yang menjiwai nilai-nilai ilmu.¹⁸⁵

¹⁸²Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas Format...*, hlm. 5.

¹⁸³Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramida, 2000), Cet. IV, hlm. 135.

¹⁸⁴Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas Format...*, hlm. 7.

¹⁸⁵Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran...*, hlm. 27.

Namun demikian, realitas problem dikotomi ilmu pengetahuan senantiasa ada dan mengakar di kalangan muslim, sehingga konsep pendidikan Islam selalu dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bersamaan dengan problem dikotomi tersebut muncul gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu pendidikan sebagai respon terhadap krisis pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sedang diderita umat Islam. Namun demikian, gagasan tersebut dikalangan cendikiawan muslim agaknya masih terdapat sikap *pro* dan *kontra* terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan, masing-masing pihak memiliki alasan-alasan yang cukup mendasar.

Dari kedua pihak tersebut sebenarnya memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama menginginkan terwujudnya kemajuan peradaban yang Islami. Hanya saja pihak yang *pro* lebih melihat dimensi ilmu pengetahuan sebagai objek kajian yang perlu dicarikan landasan yang Islami, sedangkan pihak yang *kontra* lebih melihat subjeknya atau pembawa dan pengembang iptek itu sendiri yang harus diIslamisasikan.

c) **Persoalan Dana**

Salah satu hambatan mendasar dalam pengembangan pendidikan Islam adalah masalah dana, sebab dana merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam bermutu. Asumsinya bahwa mutu pendidikan Islam rendah karena dana kurang mencukupi.

Dengan jujur bahwa problem yang dihadapi pendidikan Islam adalah kurangnya dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, baik penyediaan perangkat *hardware* maupun *software*nya, sehingga gerak operasionalnya apa adanya, terutama sekolah-sekolah swasta, dan hal ini yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan Islam dengan pendidikan umum lainnya. Persoalan kurang berkualitasnya pengajaran guru disebabkan salah satu faktor yakni rendahnya gaji yang diterima, dan inipun disebabkan kurang adanya kesadaran masyarakat (Islam) terhadap arti pentingnya sebuah proses pendidikan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan seterusnya.

Tentunya spektrum ini menjadi bahan bagi penyadaran pemerintah dan masyarakat akan kepedulian terhadap pendidikan Islam, sementara sumber dana pendidikan Islam (sekolah-sekolah swasta Islam) hanya mengandalkan SPP. Karena itu solusi mengatasi persoalan dana, ada salah satu tawaran, yakni memberdayakan lembaga dan mengembangkan usaha bisnis di luar peningkatan mutu akademik.

d) Persoalan Membangun Pendidikan Islam Secara Terpadu

Dalam konteks ini, M. Rusli Karim menyatakan bahwa “pendidikan Islam di beberapa negara Islam, yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia, tidak lebih dari dublikasi terhadap pendidikan di negara-negara Barat sekuler yang banyak mereka cela. Karena itu, tantangan mendasar

bagi pendidikan Islam saat ini adalah mencari sistem pendidikan alternatif sebagai sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada.”¹⁸⁶

Corak pendidikan Islam ke depan adalah corak pendidikan sintesis dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada, dan menumbangkan konsep dualisme dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum atau melakukan integrasi antara keduanya, serta mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Semua ini merupakan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam ke depan, dan hal ini akan berjalan dan berkembang manakala masyarakat Islam menyadari bahwa pendidikan Islam merupakan alternatif pilihan utama.

F. Peluang-Peluang Pendidikan Islam

Dalam perjalanan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di samping ada kelemahan-kelemahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas, ternyata ada berbagai peluang besar yang merupakan suatu potensi amat strategis. Adapun peluang-peluang besar pendidikan Islam di Indonesia, dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Islam adalah kebenaran, yang diakui oleh kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia, sehingga Agama Islam siap untuk memberikan kontribusi nyata dalam komponen-komponen nilai yang dibutuhkan secara nasional. Sebagaimana pernyataan Imam Barnadib bahwa “oleh karena Islam bersifat

¹⁸⁶M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), *Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 37.

universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia, maka ajaran-ajarannya memberikan landasan konseptual bagi pendidikan dan pendidikan nasional. Lebih-lebih bagi Indonesia, yang dalam gerak pelaksanaan pembangunan menghendaki Ridha Tuhan Yang Maha Esa, dapatlah dikembangkan konsep pendidikan nasional menurut Islam.¹⁸⁷ Disamping itu sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini menurut M. Arifin, “benar-benar lentur dan kenyal serta responsif terhadap tuntutan hidup manusia yang semakin maju dan modern dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu dan teknologi canggih.”¹⁸⁸ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang besar bagi pendidikan Islam adalah terletak pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.

2. Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam.
3. Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi sistem pendidikan nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian konsep penyusunan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri.
4. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga merupakan aset dalam menyadarkan dan mengembangkan pendidikan Islam.

¹⁸⁷Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan...*, hlm. 135-136.

¹⁸⁸Muzayyin Arifin, *Kapita Selekt...*, hlm. 30.

5. Dalam keadaan stabil, baik politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, adalah sangat terbuka kesempatan dan peluang bagi kelompok mayoritas untuk mengisinya.
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan melalui pendidikan, merupakan sumber dana yang tak terbatas yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus.
7. Teknologi yang berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
8. Adanya dukungan yang besar dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, dunia industri, dan masyarakat luas.
9. Dilaksanakannya desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah, memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Islam.
10. Semakin meningkatkan tuntutan masyarakat akan pendidikan yang semakin merata dan bermutu.

Apabila peluang-peluang tersebut disikapi dan direspon dengan positif, serta disiasati dan dikembangkan secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan Islam, maka akan menjadi suatu kekuatan yang akan mengantarkan pada pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategi, dan antisipatif serta

langkah-langkah operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.¹⁸⁹

G. Gagasan Format Ideal Pendidikan Islam di Indonesia

1. Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Secara etimologis paradigma diartikan sebagai model atau kerangka berfikir. Sedangkan menurut Ismail SM. secara sederhana “paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangun sesuatu”.¹⁹⁰ Merujuk dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan paradigma pendidikan Islam adalah suatu cara pandang atau cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan Islam.

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan, yang seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan, maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap dan keterampilan hidup orang Islam. Dalam konteks ini muncul berbagai paradigma pengembangan pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin, yang mencoret ada tiga paradigma pengembangan Islam di Indonesia, yakni: Paradigma formisme, paradigma mekanisme, dan paradigma organisme.¹⁹¹

¹⁸⁹Usman Abu Bakar, *Fungsi Ganda...*, hlm. 90.

¹⁹⁰Ismail SM, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001). hlm. 67.

¹⁹¹Muhaimin, *Paradigma Pendidikan...*, hlm 16

Pemotretan tersebut menggaris bawahi adanya paradigma pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, namun dalam realitasnya tidak seluruh paradigma tersebut berhasil dilaksanakan sebagaimana diharapkan, bahkan dalam pelaksanaannya mengalami *anamoli*. Hal ini dapat dilihat dari paradigma pertama, yang mencerminkan adanya pandangan dikotomis atau diskrit, dimana pendidikan Islam lebih diorientasikan pada kehidupan ukhrawi, sementara kehidupan duniawi dianggap tidak penting. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama terpisah dengan pendidikan umum, atau ilmu agama terpisah dengan ilmu umum.

Demikian juga dengan paradigma kedua, mendudukan pendidikan Islam hanya sebagai salah satu bagian dari proses pendidikan, yang diberikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Sedangkan paradigma ketiga merupakan paradigma sintesa yang mengharapakan adanya pengintegrasian antara ilmu-ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu agama dan etika, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan profesional sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama. Paradigma ini baru dipahami sebatas wacana, dan belum terealisasikan secara merata, andaikan sudah dirintis dan diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan, itu hanya terbatas pada sekolah atau madrasah-madrasah tertentu.

Dengan diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2003, merupakan titik balik dalam pencerahan, pemberdayaan, dan pengembangan sistem pendidikan

Islam khususnya, maka anomali-anomali yang terjadi selama ini perlu dikaji kembali dan perlu adanya paradigma baru, dalam kerangka merespon tuntutan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia serta membangun dan memberdayakan masyarakat, menuju masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat dibawah keridhoan Allah .

Paradigma baru pendidikan Islam lebih diarahkan pada penyelenggaraan satuan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada prinsip pendidikan Islam berwawasan semesta. Dengan harapan mampu memberikan arah yang benar dalam sistem pendidikan Islam Indonesia, sesuai dengan makna yang terkandung dalam substansi UU tersebut.

Meminjam istilah A. Malik Fadjar, bahwa “pendidikan berwawasan semesta adalah pendidikan yang tidak hanya berwawasan mendunia, tetapi berwawasan kehidupan secara utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.”¹⁹² Orientasi pendidikan berwawasan semesta tidak hanya membuat dunia menjadi sejahtera, tetapi juga mengajarkan bahwa dunia sebagai ladang, sekaligus sebagai ujian untuk dapat lebih baik di akhirat.

Paradigma pendidikan berwawasan semesta, bertolak dari keimanan setiap muslim, bahwa Islam adalah agama wahyu terakhir yang mengemban misi *rahmatan lil-‘alamin*, yaitu terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari. Sehingga seluruh penghuninya, baik manusia maupun

¹⁹²A. Malik Fadjar, *Reorientasi...*, hlm. 78.

mahluk lain merasa aman, nyaman dan kerasan di dalamnya. Misi *rahmatan lil-'alamin* dapat tercipta secara dinamis, manakala manusia dapat mengemban fungsinya sebagai *khalifah* secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam arti, dapat menempatkan dirinya secara proporsional dalam hubungan dengan Allah , sesama manusia dan alam.

Agar manusia dapat mengemban fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen, diperlukan ikhtiar pendidikan yang sistematis dan berencana, dapat membimbing dan mengarahkan, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga manusia tersebut mampu mengemban amanat dari Allah, yakni menjalankan tugas hidupnya sebagai '*abdulah*, dan sekaligus sebagai *khalifah* dalam rangka mewujudkan *rahmatan lil alamin*.

Karna itu ikhtiar pendidikan Islam lebih diarahkan pada paradigma pendidikan berwawasan semesta, agar dimensi ketuhanan tetap ada pada diri manusia secara bersama, saling berkait dan tak terpisah satu sama lain. Pendidikan berwawasan semesta ini, sebagai mana diketemukan oleh A. Malik Fadjar, meliputi *wawasan tentang Ketuhanan* yang akan menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan.

Wawasan tentang manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi hak azazi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan. Dan *wawasan tentang alam* akan melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran yang mendalam melestarikannya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus

dieksploitasi seenaknya, melainkan sebagai mitra dan sahabat yang ikut menentukan corak kehidupan.¹⁹³

Dengan paradigma pendidikan berwawasan semesta, akan melahirkan manusia berdimensi Ketuhanan dan sekaligus terpadu secara bersama-sama dengan dimensi kemanusiaan, dan kealaman, sehingga mampu mewujudkan dimensi *rahmatan lil-'alamin*.

Dalam konteks pembaruan sistem pendidikan Islam di Indonesia diletakkan pada paradigma tersebut, dengan membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, dan juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

2. Strategi Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia

Diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memiliki implikasi langsung dan mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan Islam. Untuk kepentingan itu, pembaruan sistem pendidikan Islam merupakan suatu keharusan, dalam upaya mewujudkan *akuntabilitas* pendidikan Islam.

Ikhtiar pembaruan Islam dilakukan, karena ada beberapa isu strategis yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam.

Antara lain:

¹⁹³A. Malik Fadjar, *Reorientasi...*, hlm. 69.

- a. Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, disentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak azazi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.
- c. Adanya tuntutan *akuntabilitas* dan *relevansi* pendidikan, dan
- d. Lemahnya kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Dengan mendasarkan pada isu-isu di atas, ada beberapa syarat dasar yang diperlukan dalam pembaruan sistem pendidikan Islam, sehingga akan terwujud perubahan-perubahan positif dalam pendidikan Islam. E. Mulyasa menyebutkan antara lain “sikap positif terhadap pembaruan bagi semua komponen, dan adanya sumber yang diperlukan untuk mengadakan pembaruan.”¹⁹⁴

Adapun Zamroni menyebutkan: ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni “mengidentifikasi berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, dan merumuskan pembaruan (reformasi) yang bersifat strategi dan praktis sehingga dapat diimplementasikan dilapangan”.¹⁹⁵

Berdasarkan pandangan di atas, pembaruan pendidikan Islam di Indonesia yang ditawarkan disini adalah mereformasikan konsep pendidikan Islam, dengan langkah-langkah: *Pertama*, membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam; *Kedua*, Membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

¹⁹⁴E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

¹⁹⁵Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

Laboratorium fungsi ganda yang dimaksud meliputi: *pertama*, peningkatan mutu akademik yang mencakup (1) perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan; (2) pengembangan kurikulum dan materi ajaran pendidikan dengan prinsip diverifikasi; (3) metodologi pembelajaran; (4) profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; (5) pengembangan manajemen; (6) pengadaan sarana dan prasarana; (7) membangun jaringan kemitraan (*network*), dan *Kedua*, pengembangan usaha dan bisnis.

3. Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Semesta

Pada hakekatnya konsep pendidikan Islam adalah konsep yang sangat ideal, karena digali dari sumber dasar Islam. Hal ini dapat dilihat secara konseptual dari berbagai pendapat intelektual muslim, seperti Hasyim Amir mengemukakan, bahwa “pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar budaya kuat”. Begitu juga dengan A. Malik Fadjar menyebutkan, “konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, berwawasan kehidupan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif”.¹⁹⁶ M. Rusli Karim, menambahkan bahwa: “konsep pendidikan Islam tidak hanya didasarkan kemaslahatan umum (*humanisme universal*), melainkan juga bermuara pada pembentukan manusia yang mencakup dimensi *imanensi (horizontal)* dan dimensi *transendensi (vertikal)*.”¹⁹⁷ Sedangkan A. Syafi’i Ma’arif, menyatakan: “di mata Al-

¹⁹⁶A. Malik Fadjar, *Reorientasi...*, hlm. 97

¹⁹⁷M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam...”, hlm. 79

Qur'an, eksistensi manusia di muka bumi hanyalah bermakna, bila kegiatan buminya diorientasikan secara sadar ke langit. Tanpa orientasi semacam itu apapun bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan tidak akan mempunyai nilai di sisinya".

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ide-ide cemerlang dari para pemikir intelektual muslim Indonesia dalam mengonsep pendidikan Islam, dan jika konsep tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dilapangan (penyelenggaraan satuan pendidikan Islam). Jelas akan mengantarkan pendidikan Islam kesuatu puncak kemajuan, namun demikian ide-ide tersebut ternyata belum direspon secara positif oleh para penyelenggara pendidikan Islam.

Karena itu, ide-ide tersebut akan diformulasikan kembali dan dikemas melalui konsep pendidikan Islam. Dengan langkah-langkah membangun kerangka dasar filosofis-filosofis, dan sistemnya yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

a. Membangun Kerangka Filosofis Pendidikan Islam

Suatu usaha pembaruan pendidikan dapat terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan yang mantap. Artinya untuk menyelenggarakan pendidikan tentu harus memahami ilmu pendidikan, dan sudah barang tentu memerlukan landasan-landasan yang berasal dari filsafat atau setidaknya mempunyai hubungan dengan filsafat. Dikatakan landasan, bila filsafat melahirkan pemikiran yang teoritis mengenai pendidikan, dan

dikatakan hubungan bila berbagai pemikiran mengenai pendidikan memerlukan iluminasi dan bantuan penyelesaian dari filsafat.

Dikalangan cendekiawan Islam pemerhati dan pengembang pendidikan Islam Indonesia sepakat bahwa sumber utama penggalian persoalan-persoalan filosofis pendidikan Islam adalah al-Qur'an dan sunnah.¹⁹⁸ Menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam. Difahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah. Al-Syaibani menyatakan dalam segala prinsip dan kepercayaan serta kandungan filsafat pendidikan sesuai dengan *ruh* (spirit) Islam.¹⁹⁹

Hal ini menjadi titik kejelasan bahwa al-Qur'an dan sunnah memiliki kebenaran universal yang harus dipelihara, dikembangkan dan diinternalisasikan berupa penanaman, penyerapan dan pengamalan dalam proses pendidikan. Literatur filsafat pendidikan Islam di Indonesia dalam rangka internalisasi itu banyak berbicara tentang hakekat manusia sebagai *Abdullah* (hamba Allah) dan *Khalifatullah* (khalifah Allah di bumi) serta relasi atau posisi antara manusia dengan Tuhannya serta alam semesta atau makhluk lain.

Karena itu langkah awal dalam pembaruan sistem pendidikan Islam adalah membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam secara jelas, dengan

¹⁹⁸Di antara penulis tentang filsafat pendidikan Islam yang banyak beredar dikalangan publik luas menjelaskan tentang hal itu (al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber filsafat pendidikan Islam), seperti dapat diperoleh keterangan dan penjelasan dari tulisan, Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*, (Yogyakarta: SIPRES, 1993) dan tulisan Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Loggos, 1997) serta tulisannya M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

¹⁹⁹Oemar Mohammad Al-Taoumy Al-Syaibani, *Falsafah at-Tarbiyah al-Islamiyyah*, Terjemah Hasan Langgulung *Falsafah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 37-53.

asumsi dan kaitan erat antara dimensi fondasional pendidikan Islam dengan dimensi struktural dan operasionalnya. Jika tidak, maka akan berimplikasi langsung terhadap praktek pendidikan Islam. Dengan kata lain akan terjadi salah arah dan sasaran (*mis-oriented*), rapuh serta tidak memiliki jati diri.

Namun pemikiran filsafat pendidikan Islam Indonesia lebih bersifat dan cenderung teosentris, karena adanya “*kekurang pasan*” filsafat pendidikan Islam dalam memberikan tafsiran al-Qur’an dan sunnah sebagai sumber ilmu pengetahuan dari Illahi dan RasulNya, sedangkan Barat antroposentris, yang dalam pandangan filsafat pendidikan Islam antroposentris adalah *interconnected* dalam teosentris.²⁰⁰

Namun begitu, pemikiran filsafat pendidikan Islam di Indonesia tidak *mandeg* pada pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai esensial al-Qur’an dan sunnah, tetapi bahkan melebar ketika memasuki pembahasan tentang interpretasi atau penafsiran dan hermeneutika al-Qur’an dan sunnah. Yang di mana dalam hal ini ada kemungkinan semua cendekiawan akan memberi dan menemukan kesimpulan sama ketika pemikiran hanya beranjak dari nilai universal al-Qur’an dan sunnah dan pesan inti yang terkandung. Tetapi lain lagi jika yang ditangkap adalah nilai-nilai instrumentalnya. Hal ini antara lain karena kedua sumber ajaran Islam tersebut terdapat peluang penafsiran secara kontekstual menurut zaman dan sosiokultural si

²⁰⁰Mastuhu menjelaskan bahwa paradigma baru pendidikan Islam berdasar pada filsafat teosentris dan antroposentris. Dan hal inilah yang membedakan pendidikan Islam dengan model pendidikan sekuler. Perbedaan ini akan berimplikasi pada perbedaan format atau konstruksi pendidikan yang diformulasikan. Baca, Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmuis, 1999), Cet. II, hlm. 1519.

penafsir. Yang pada akhirnya melahirkan berbagai pemetaan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia.

Dalam Islam perkembangan pemikiran filosofis pendidikan Islam dapat dicermati dari pola pemikiran Islam yang berkembang dewasa ini, yang muncul dalam rangka menjawab tantangan dan perubahan zaman serta era modernitas. Yaitu model Tekstualis Salafi, model Tradisionalis Mazhab, model Modernis, dan model Neo-Modernis.²⁰¹ Pola pemikiran Islam demikian ini masing-masing akan mempengaruhi terhadap bagaimana bangunan pendidikan Islam yang diharapkan oleh perumusannya. Adanya variasi pola pemikiran ini akan memunculkan tipologi-tipologi yang masing-masing berbeda dalam pendidikan Islam.

Dan pada dasarnya wacana pengembangan pemikiran filosofis pendidikan Islam di Indonesia tidak berbeda jauh dari wacana yang berkembang dalam diskursus pengembangan pemikiran filosofis pendidikan Islam dalam Islam itu sendiri. Meskipun belum tentu suatu pemikiran akan relevan dalam suatu setting sosial dan kultural masyarakat yang berbeda, di mana Indonesia adalah satu dari sekian banyak komunitas muslim yang ada dan dimiliki dunia Islam, pasti memiliki karakteristik sosial kultural masyarakatnya sendiri.

Untuk membuktikan bahwa wacana pengembangan pemikiran filosofis pendidikan Islam di Indonesia tidak jauh berbeda –bila tidak dapat dikatakan terkontaminasi, atau dipengaruhi pula oleh wacana pemikiran pendidikan yang ada

²⁰¹Pola pemikiran keislaman dalam klasifikasi seperti tersebut di lakukan oleh M. Amin Abdullah *Pemikiran Filsafat Islam*, 1996, dan dikutip oleh Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM) bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 50.

dalam Islam itu sendiri, maka dalam satu kesatuan penjelasan tentang pola-pola tersebut akan dikemukakan pemikiran-pemikiran beberapa ahli atau kalangan yang bisa dikatakan *concern* terhadap permasalahan-permasalahan kependidikan di Indonesia. Yang dari hal demikian ini, diharapkan akan dapat memberikan satu karakter tipologi tersendiri bagi pendidikan Islam di Indonesia, setelah memberikan analisis kritis secara deduktif dan induktif dan penyesuaian dengan keadaan sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Keterangan tentang pola-pola itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) **Tekstualis-Salafi**

Model *Tekstualis Salafi* adalah suatu pola pemikiran yang memahami ajaran dan nilai dasar al-Qur'an dan sunnah dengan melepaskan dan kurang mempertimbangkan situasi konkrit dinamika pergumulan masyarakat Muslim, dan juga tanpa menggunakan pendekatan keilmuan lain, melainkan rujukan utamanya adalah dalil-dalil nash ayat-ayat al-Qur'an dan hadist²⁰² yang diidamkan masyarakat era Nabi dan para sahabat (era *salafi*).

Termasuk demikian ini adalah pendapatnya Jalal bahwa sumber pemikiran pendidikan Islam hanya al-Qur'anul Karim dan hadist Rasulullah dan tidak perlu mencari sumber lain, karena Nabi adalah utusan Allah dan sebagai seorang guru,²⁰³ juga hal yang senada adalah pendapatnya al-Nahlawi.²⁰⁴

²⁰²Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 50

²⁰³Lihat Abdul Fattah Jalal, *Min al-Ushul at-Tarbawiyah fi al-Islam*, Penerjemah Herry Noer Ali, *Azas-Azas Pendidikan Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hlm. 15.

²⁰⁴Al-Nahlawi menyatakan bahwa "...takunu masjid al-Islam hiya nafsuha masjid at-tarbiyah al-Islamiyyah, wa ahamuha al-Qur'anwa sunnah", lihat Adburrahman Al-Nahlawy, *Ushul*

Dalam pemikiran filosofis pendidikan ada dua mazhab yang dekat model ini, yaitu perennialis dan esensialis.²⁰⁵ Perennialis menghendaki kembali pada jiwa (agama) abad pertengahan, demikian model ini menghendaki kembali pada masyarakat salafi yang bersifat regresif. Essensialis menghendaki hal sama, karenanya juga beranggapan bahwa nilai-nilai hidup salafi, nilai Illahiyah dan insaniyah, harus dijunjung tinggi dan dilestarikan. Dari sini terlihat model tekstualis salafi adalah bersifat konservatif.

Model tekstualis salafi ini, membangun konsep pendidikan Islam berdasar penelitian lughawi dan kaidah-kaidah bahasa Arab dalam memahami teks al-Qur'an, sunnah, perkataan sahabat, serta memperhatikan praktik pendidikan era salafi kemudian berikhtiar mempertahankan dan melestarikannya.

Karena model pembacaan terhadap teks yang demikian ini, model ini dikategorikan juga tipologi *perennial-tekstualis salafi*, yaitu persamaan watak regresifnya; ingin kembali ke era salafi dengan pemahaman tekstual, juga karena sifat tekstualis ini berarti pula disebut *esensialis-tekstualis salafi*, yaitu persamaan watak konservatifnya; mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Illahiyah dan

at-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Asalibuha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama', (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 21.

²⁰⁵Di Barat tipologi pemikiran pendidikan dikelompokkan menjadi kelompok mazhab tradisional dan mazhab kontemporer. Termasuk kelompok pertama adalah perennialism dan essentialism, dan termasuk kelompok kedua adalah progressivism, reconstructionism dan existentialism. Perennialism menghendaki pendidikan kembali pada jiwa (agama) yang menguasai abad pertengahan, karena terbukti bisa menuntun manusia. Essentialism menghendaki pendidikan yang bersendikan nilai-nilai budaya yang tinggi, dan pendidikan sebagai perantara dan pembawa nilai-nilai untuk diserap peserta didik. Progressivism menghendaki pendidikan bertujuan merekonstruksi pengalaman-pengalaman yang simultan, agar peserta didik beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Reconstructionism menghendaki kebangkitan kemampuan secara konstruktif untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Existentialism menghendaki pendidikan melibatkan peserta didik dalam memilih dan memilah pemenuhan kebutuhan, karena tiap individu adalah mahluk yang unik dan bertanggungjawab atas diri. Keterangan ini dikutip dari Ellis, Jhon J. Cogan dan Kenneth R. Hpwey, *Introducion to the Fondations of Education*, (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986), hlm. 115 oleh Muhaimin,..., hlm. 40

insaniyah era salafi, yang juga secara tekstualis tanpa ada verifikasi dan kontekstualisasi. Simplifikasi terhadap dua kategori tersebut digunakan istilah *perennial esensialis salafi*.

Pemikir filosofis pendidikan Islam di Indonesia yang termasuk dalam kategori ini dapat disebut sementara Abudin Nata, yaitu pemikirannya yang lebih banyak memberi pembahasan dan penekanan pada pemberian *syarh* atau *hasyia*²⁰⁶ tanpa ada keberanian melakukan kritik pada pemikir pendahulunya.

Hal ini terlihat semisal penggunaan analisis simantiknya (lughawi) dalam hal-hal tertentu ketika menguraikan topik pendidikan; menggunakan *term ta'lim*, *ta'dib* dan *tarbiyah*. Demikian ketika pada topik manusia; menggunakan istilah *al-basyar*, *al-insan*, *al-nas*, *al-khalifah*. Dan pendidik dengan istilah *ustadz*, *mudaris*, *mu'allim* serta peserta didik dengan istilah *murid*, *tilmidz*.²⁰⁷

Juga dalam kategori ini adalah Jalaludin dan Usman Said yang dalam karya “Filsafat Pendidikan Islam Konsep dan Perkembangan Pemikirannya” yang menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengembangkan filsafat pendidikan Islam, adalah pendekatan terhadap wahyu dan pendekatan sejarah. Dalam sub lain ia juga menyatakan bahwa pemikiran mengenai filsafat pendidikan Islam harus ditelusuri melalui kandungan wahyu, para pemikir terdahulu, serta kondisi dan kehidupan masyarakat modern.

Dengan demikian pemikiran filsafat pendidikan Islam serasi dengan

²⁰⁶Syarh yaitu penjelasan dari substansi materi pemikiran pendahulunya dan *hasyiyah* yaitu memberi catatan kaki, pinggir atau komentar pada materi pemikiran pendahulunya.

²⁰⁷Lihat dan baca dalam karya Abudin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern tanpa harus meninggalkan tuntutan ajaran agamanya. Jika ditelaah dari substansi pemikirannya, ada inkonsistensi dalam kajian tentang prinsip atau dasar pemikiran maupun dalam tinjauan filosofis tentang komponen-komponen pokok aktivitas pendidikan Islam, di mana terlihat lebih banyak menggunakan pendekatan wahyu dari pada pendekatan sejarahnya, sehingga cenderung bersifat perennial esensialis salafi.

2) Tradisionalis Mazhabi

Model *Tradisionalis Mazhabi* adalah suatu pola pemikiran yang memahami ajaran dan nilai kandungan al-Qur'an dan sunnah melalui khazanah pemikiran Islam klasik tanpa mempertimbangkan situasi sosio-historis teks pemikiran karena dianggap pemikiran pendahulunya adalah absolut. Mengidealkan masyarakat era klasik, dan persoalan keagamaan dianggap telah selesai dikupas ulama ketika itu. Pola pikirnya berpijak dari hasil ijtihad ulama dahulu dengan merujuk pada kitab-kitab kuning. Dan pemikirannya berkuat atas mazhab keislaman yang terbentuk pada abad itu. Sehingga model ini berwatak *tradisional* dan *mazhabi*.²⁰⁸ Yaitu cara berpikir dan tindakannya yang teguh pada nilai kebiasaan dan tidak terpengaruh oleh keberadaan sosio historis yang ada.

Karena wataknya yang seperti tersebut, konsep pengembangan pemikiran filsafat pendidikan Islamnya menekankan pemberian *syarh* dan *hasyiyah* dan pendidikan Islam berfungsi mempertahankan dan mewariskan nilai, tradisi dan

²⁰⁸Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 52.

budaya serta praktik pendidikan ulama terdahulu, tanpa proses kontekstualisasi. Berusaha membangun konsep pendidikan Islam melalui kajian terhadap khazanah pemikiran pendidikan Islam para pendahulu dalam hal tujuan, kurikulum, metode dan lainnya. Karenanya, model ini juga berwatak perennialis dan esensialis; regresif dan konservatif, disederhanakan dengan menjadi *perennial-esensialis mazhabi*.

Pemikir pendidikan Islam di Indonesia yang termasuk dalam kategori ini sementara dapat disebut Abudin Nata juga, yaitu dalam pembahasannya tentang tujuan pendidikan Islam menggunakan istilah “mengarahkan” yang memberi kesan peserta didik hanyalah obyek pendidikan, dan menggunakan istilah “memberikan” yang memberi kesan peranan guru sangat dominan dalam pendidikan dan pembahasannya pada etika yang mengambil begitu saja dari pandangan Ali Ibn Abu Thalib, al-Zarnuji, dan al-Ghazali. Serta pembahasannya juga dalam kurikulum yang banyak mengikut mazhab Nasution dan al-Syaibani, tanpa kritisisme yang sepadan,²⁰⁹ yang seharusnya ia lakukan.

²⁰⁹Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hlm. 101.

3) Modernis

Sedangkan pada model *Modernis* terdapat ikhtiar memahami ajaran dan nilai kandungan al-Qur'an dan sunnah dengan mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio historis dan kultural yang dihadapi masyarakat kontemporer namun secara *ansich*. Yaitu tidak melihat penelitian era klasik tentang kegamaan dan kemasyarakatan yang telah dihasilkan para pemikir terdahulu. Tapi langsung menuju pengkajian pada al-Qur'an dan sunnah dalam memecahkan permasalahan era modern yang kompleks.

Pada konteks pemikiran filosofis pendidikan Islam, model ini dekat dengan progresivisme; yaitu bersikap bebas dan modifikatif. Tidak suka merujuk pemikiran pemikir terdahulu dalam segala hal termasuk pemikiran pendidikannya, yang dianggapnya tidak relevan karena hanya berlaku pada sosio historis dan kultural saat itu saja.

Tetapi sikap bebas dan modifikatif, berkonsekuensi logis adanya dialektika untuk mendengarkan, menerima bahkan mengadopsi kebenaran orang lain seperti berupa temuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk pemikiran pendahulunya. Serta fungsi pendidikan Islam adalah mengarahkan peserta didik bersikap progresif dan dinamis dalam mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai kebenaran mutlak.

Namun dalam realitas yang nampak, praktik pendidikan dari hasil pemikiran model ini kadang terjebak pada pandangan yang dikotomik; pemilahan pendidikan agama dan pendidikan umum. Yaitu berorientasi pemahaman dan pengamalan ajaran agama bermuara pada persoalan akidah, syariah serta iman, Islam dan ihsan

dalam mencapai keimanan dan ketaqwaan, yang tidak dukung oleh penguasaan iptek, serta berorientasi pada penguasaan iptek yang kurang dan tidak dijiwai ajaran agama. Sehingga pada akhirnya melahirkan *split of personality* atau kepribadian yang membelah.

Sedangkan pemikir pendidikan Indonesia yang dapat dikemukakan pemikirannya lebih sesuai dengan tipe modernis ini adalah dapat dilihat karya M. Arifin “Filsafat Pendidikan Islam”. Dalam pembahasannya yang menyinggung mengenai sumber selain al-Qur’an dan sunnah dalam pendidikan Islam, M. Arifin berusaha menggunakan hasil pemikiran filsafat Yunani, filsafat pendidikan Barat, dan pemikiran dari para cendekiawan muslim itu sendiri.

Di mana di dalam mentransfer pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikiran dari non muslim, ia sepertinya menggunakan paradigma islamisasi. Yaitu melihat pandangan-pandangan tentang pendidikan dari non muslim, sebagai sesuatu yang harus dikaji dan diuji kebenarannya dalam perspektif Islam dengan cara menggali teks dalam rangka mengarahkan pandangan non muslim kepada corak yang lebih Islami.²¹⁰

Terlihat sikap terbuka pada pemikiran M. Arifin terhadap pemikiran para filosof, ilmuwan baik dari kalangan muslim maupun non muslim, di dalam mengembangkan filsafat pendidikan Islam. Juga dari model berpikirnya, ia lebih berangkat dari kepedulian akan keterbelakangan umat Islam dalam pentas global dewasa ini, karena disebabkan kepicikan berpikir, kebodohan, dan ketertutupan

²¹⁰M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987), hlm. 99.

dalam memahami ajaran agamanya sendiri.

Karena paradigma dan model berpikirnya yang demikian ini, ia dapat dikategorikan pemikir pengembangan pemikiran pendidikan Islam Indonesia yang modernis.

4) Neo-Modernis

Terkahir Neo-Modernis, model ini memahami ajaran dan nilai kandungan al-Qur'an dan sunnah dengan mempertimbangkan dan mengikutsertakan khazanah intelektual klasik di samping mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan dunia teknologi modern. Sumber rujukannya adalah al-Qur'an, sunnah, dan khazanah klasik serta pendekatan keilmuan yang muncul era abad 19 dan 20.²¹¹ Dengan kata lain keilmuan yang muncul di era kontemporer.

Pemikirannya mengambil hasil pemikiran klasik yang baik dan dikontekstualisasikan pada eranya untuk mengembangkan rumusan-rumusan dan nilai-nilai baru. Jargon yang sering didengungkan adalah *al muhafazah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhzu bi al-jadid al-aslah*. Karena itu dalam neo-modernis terdapat unsur perennialis dan esensialis; bersikap regresif dan konservatif pada nilai-nilai Illahiyah dan insaniyah yang telah dibangun pemikir klasik. Akan tetapi, sikap ini kemudian dikontekstualisasi yakni mendudukan khazanah intelektual klasik pada konsteksnya.

²¹¹ Muhaimin, *Wacana Pengembangan...*, hlm. 56.

Sikap mengkontekstualisasi ini, bukanlah proyek mudah, bisa saja menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Diperlukan prinsip *falsifikasi*; di mana suatu pemikiran, teori atau ucapan bersifat ilmiah jika ada kemungkinan untuk menyatakan salahnya. Melakukan uji falsifikasi dalam kaitan keberlakuan atau ketidakberlakuannya pada kasus-kasus tertentu, dan menguji relevan atau tidaknya pemikiran pendahulu dalam konteks masa kini dengan menggunakan pendekatan keilmuan yang ada. Yang relevan akan dilestarikan dan yang tidak relevan disikapi dengan mencari alternatif lainnya yang terbaik (*al-akhzu bi al-jadid al-aslah*) dalam konteks pendidikan masyarakat Muslim kontemporer.

Dari sini, terlihat dalam neo-modernis menunjukkan adanya sikap dinamis dan progresif serta rekonstruksionis yang tidak radikal. Pada konteks pemikiran filosofis pendidikan Islam dikategorikan dalam tipologi *perennial-esensialis kontekstual falsifikasi*.

Abudin Nata juga dapat dikategorikan dalam model ini yaitu ketika dalam pengantarnya mengkritik konsep pendidikan yang ditawarkan beberapa ahli yang tidak mengenal filosof muslim seperti al-Ghazali dan Ibnu Shina serta lainnya dan pendidikan Islam harus diupayakan pada pemikiran tantangan zaman yang dihadapi.²¹² Dari pemikirannya yang seperti ini bisa juga dikategorikan *perennial-esensialis kontesktualis falsifikasi*.

Kemudian Mastuhu dapat pula pemikirannya dikategorikan sebagai *perennial-esensialis kontesktualis falsifikasi*. Karena pada karyanya

²¹²Lihat dan baca dalam karya Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam...*,

“Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam”, di mana ia berusaha menawarkan sebuah konsep hubungan yang harmonis antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Ia menawarkan perpaduan aspek tradisional dan aspek modern, yang diharapkan muncul konsep pendidikan Islam. Dalam hal ini ia menulis:

1. Konsep pendidikan sekuler tidak sepenuhnya tidak cocok dengan ajaran Islam. Ia mengandung beberapa kebenaran, terutama yang berkenaan dengan Iptek yang dapat diterima oleh Islam;
2. Sebaliknya, Islam tetap menghormati dan menerima konsep pendidikan tradisional yang sudah mengakar atau mentradisi dalam kehidupan umat Islam. Namun demikian harus disadari adanya hal-hal yang perlu ditinggalkan karena sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman. Dalam Islam ada prinsip: *“memelihara hal-hal yang baik yang telah ada sambil mengembangkan nilai-nilai baru yang lebih baik”*.²¹³

Bila diperhatikan pernyataan Mastuhu tersebut, maka bisa didapatkan beberapa hal sebagai berikut; ia bersikap regresif dan konservatif terutama dalam pendidikan agama, yang menghormati dan menerima konsep pendidikan tradisional yang sudah mengakar atau mentradisi dengan melakukan kontekstualisasi dan verifikasi atau falsifikasi untuk menemukan hal-hal yang perlu ditinggalkan karena sudah tidak relevan; bersikap rekonstruktif tapi tidak radikal; wawasan kependidikan Islam yang *concern* terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahasan sosial.

Karena sikap yang demikian ini, yang berarti juga menampakkan tipe pemikirannya, maka Mastuhu lebih cenderung pemikirannya tersebut kepada

²¹³Mastuhu, *Madrasah Sejarah...*, hlm. 18.

perennial-esensialis kontesktualis falsifikas.

Jika dicermati, pemikiran-pemikiran pendidikan Islam yang disebut dan dijelaskan di atas, bisa digarisbawahi bahwa ada tiga alur pemikiran dalam menjawab persoalan pendidikan. Yaitu kelompok yang berusaha membangun konsep (filosofis) pendidikan Islam, di samping melalui al-Qur'an dan hadist sebagai sumber utama, juga mempertimbangkan pemikiran para sahabat, kemaslahatan sosial, nilai-nilai dan kebiasaan sosial, serta pandangan pemikir-pemikir Islam. Dan kelompok yang berikhtiar mengangkat konsep pendidikan Islam dari al-Qur'an dan hadist, sehingga konsep filsafatnya hanya berasal dari kedua sumber ajaran Islam tersebut. Serta kelompok yang berikhtiar membangun pemikiran filosofis pendidikan Islam melalui al-Qur'an dan hadist, dan bersedia menerima setiap perubahan dan perkembangan budaya baru yang dihadapinya untuk ditransformasikan menjadi budaya yang Islami.

Di mana dalam penerepan ketiga alur pendidikan itu memunculkan corak atau pola pemikiran yang berbeda seperti yang dijelaskan di atas. Alur yang pertama akan lebih cenderung bersifat konservatif dalam pemikiran pendidikannya, alur yang kedua lebih cenderung bersifat doktrinal, normatif dan idealistik dan pada alur yang ketiga pemikiran pendidikan Islam lebih legitimitif dan pragmatis, yakni suatu nash tertentu didudukkan sebagai alat justifikasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan yang sedang berkembang, yang belum tentu relevan dengan pendidikan Islam, sehingga hanya bersifat adopsi.

Sedangkan Azyumardi Azra mengungkapkan kecenderungan perkembangan pemikiran pendidikan Islam di Indonesia yaitu; pertama, mendekatinya secara

doktrinal, normatif dan idealistis; kedua, mengadopsi filsafat, pemikiran dan teori kependidikan Barat, tanpa kritisisme yang memadai, bahkan hampir terjadi pengambilan mentah-mentah; ketiga, memberi legitimasi terhadap pemikiran dan filsafat pendidikan Barat dengan ayat al-Qur'an dan hadist tertentu, sehingga yang menjadi titik tolak adalah pemikiran kependidikan Barat, yang belum tentu kontekstual dan relevan dengan pemikiran kependidikan Islam; keempat, pemikiran kependidikan Islam atau yang relevan dengannya yang dikembangkan para ulama, pemikir dan filosof Muslim sedikit sekali diungkap dan dibahas.²¹⁴

Berbicara mengenai pendidikan Islam tidak lepas dari pembicaraan mengenai pandangan hidup Islami yang tercermin dari sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam. Secara filosofis pandangan hidup Islam bermula dari pemahaman tentang hakekat dimensi positif manusia. hakekat tentang manusia itu akan menggariskan adanya keharusan pendidikan Islam sebagai proses menuju terbentuknya manusia yang sesuai dengan hakekat itu yaitu agar mampu menjadi *Abdullah* dan seklaigus *khalifatullah*.

Sebagai ilustrasi, Ali Syarianti yang dikutip Azyumardi Azra mengungkapkan, bahwa “keunikan manusia yang mempunyai dua dimensi dengan dua kemungkinan yang terbuka baginya. Misalnya tentang terdapatnya kontradiksi antara Tuhan dan Iblis dalam diri manusia, atau dalam proses lebih lanjut antara manusia yang berbeda dalam garis Habil dan Qabil yang merupakan simbol manusia baik dan orang jahat”.²¹⁵

²¹⁴Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm. 91.

²¹⁵ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam...*, hlm 100

Hakekat manusia dalam sikap dan keterampilan hidupnya berdimensi negatif, karena dimensi keimanan atau spiritual (*qalb*), rasionalnya (*aql*) tidak difungsikan untuk mengendalikan dimensi negatif tersebut, sehingga barometer kehidupannya hanya berdasarkan dan dikendalikan hawa nafsu yang dimiliki. Manusia seperti ini pada gilirannya akan berbuat kemungkar, kesombongan, kerusakan, kezaliman, dan kebodohan. Ilmu pengetahuanlah yang akan mempengaruhi semuanya.

Bertolak dari pandangan di atas, bahwa peran dan kedudukan ilmu pengetahuan, dalam arti luas yaitu ilmu agama dan ilmu umum (*duniawi*) akan bisa mempengaruhi sifat, sikap dan keterampilan hidup manusia, maka bangunan dasar filosofis dalam sistem pendidikan Islam harus diletakkan pada setting pengembangan, penyebaran, penerapan (*transfer*) dan internalisasi ilmu pengetahuan.

Semua ini berindikasi bahwa pendidikan yang benar haruslah melibatkan pelatihan fisik dan pendisiplinan fakultas spiritual manusia secara seimbang dan integral. Konsekuensinya, manusia harus diberi informasi yang patut dan diajari mengenai kemampuan-kemampuan dan keterbatasan fisik dan moral, juga mengenai hal-hal yang memungkinkan untuk meningkatkan perkembangan dirinya.

Pandangan diatas menunjukkan suatu pemahaman atau penafsiran mengenai Islam yang berupa ilmu pengetahuan, filsafat, sains, dan lainnya terhadap makna hidup, yakni pandangan hidup yang dimanifestasikan dalam sikap hidup dan keterampilan hidup seseorang yang dapat mendatangkan berkah, yaitu nilai tambah kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pandangan ini berangkat dari makna *al-*

hayah (hidup) adalah *al-harakah* (bergerak atau gerakan/kegiatan), dan *al-harakah* adalah *al-barakah* (bergerak atau beraktifitas yang bisa mendatangkan berkah), sedangkan *al-barakah* adalah *al-ziyadah* (nilai tambah dalam hidup), *al-ni'mah* (kenikmatan dan kenyamanan hidup), dan *al-sa'adah* (kebahagiaan).

Spektrum diatas merupakan tugas dan kerja monumental pendidikan Islam dalam mengorientasikan satuan pendidikannya, untuk dapat menyiapkan kader-kader *'abdullah*, sekaligus *khalifatullah*. Dengan itu secara fungsional keberadaanya memiliki dimensi ketuhanan, dimensi kemanusiaan, dan dimensi kealaman, dalam kerangka menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan hidup yang *rahmatan lil-'alamin*.

Membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan harus memandang secara profesional, bahwa hakekat manusia memiliki dua dimensi antara dimensi *imaniyah* (positif), dan dimensi *kafiriah* (negatif) dalam pandangan hidupnya, baik yang berhubungan dengan Allah, manusia dan alam. Implikasi dari bangunan tersebut terkait dengan hubungan sistem pendidikan Islam. Imam Barnadib menyebutkan, ada tiga bangunan sistem filsafat :

- a. Realita, yakni mengenai kenyataan yang menjurus masalah kebenaran. Realita ini dipelajari oleh metafisika atau *ontologi*.
- b. Pengetahuan, yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan dan pengetahuan dipelajari oleh *epistimologi*.
- c. Nilai, yang dipelajari oleh *aksiologi*, tentang pertanyaan yang dicari jawab mengenai nilai-nilai yang bagaimana yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya.

- d. Ajaran berfikir, yakni menyangkut masalah hubungan yang benar dan tepat antar gagasan yang telah dimiliki oleh manusia sebagai hasil epistemologi. Hal ini dipelajari oleh logika.²¹⁶

Dari pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pandangan mengenai realita dikaji oleh *ontologi*, pandangan mengenai pengetahuan dikaji oleh *epistemologi*, dan pandangan mengenai nilai dikaji oleh *aksiologi*, dan semua ini disebut sistem filsafat. Karena itu banyak pakar yang memberikan konsep tentang substansi dari filsafat, seperti al-Syaibani yang dikutip Muhaimin menyebutkan: ”*tabi’ah al-kaun* (hakekat jagat raya), *tabi’ah al-insan* (hakekat manusia), *tabi’ah al-mujtama’* (hakekat masyarakat), *tabi’ah al-ma’rifah al-basyariyyah* (hakekat pengetahuan manusia), dan *tabi’ah al-qiyam al-khuluqiyah* (hakekat nilai-nilai akhlak)”. Bertolak dari pandangan di atas, pembahasan ini hanya ditekankan pada hakekat manusia, sebab berbicara pendidikan tidak lepas dari manusia dan dalam hidupnya yang berhubungan erat dengan aspek-aspek tersebut.

Dimensi realita (*ontologi*), bahwa manusia diciptakan oleh Allah . Dengan segala entitasnya terdiri dari unsur *jasmaniah*, *nafsiyah* dan *ruhiyah*. Yang dilengkapi dengan potensi-potensi pokok, seperti: *al-qalb*, *al-aql*, dan *al-nafs*. Secara propesional *nafsiyah* duduk pada posisi antara *jasmaniyah* dan *ruhaniyah*, dengan posisi ini manusia memiliki kecenderungan yang unik, artinya tergantung pada alat penggeraknya (*nafsiyah*).

²¹⁶Imam Barnadib, *Filsafat Pendidikan...*, hlm 43.

Jika *nafsiyah* berada pada posisi *jasmaniyah*, dan dapat dukungan penuh dari *al-nafs* serta pertimbangan dari *al-aql*, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi unsur biologis (materi) nya. Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi *kafiriyah* (negatif), atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *Asfala Safilin*, yakni berada pada posisi terendah (Q. S. 95:5). Sebaliknya jika *nafsiyah* berada pada posisi *ruhaniyah*, dan mendapat dukungan penuh dari *al-qalb* serta pertimbangan dari *al-aql*, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi kebutuhan ruhnya dan mengajak manuju ke Tuhannya, karena ruh berasal dari Allah . Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi *imaniyah* (positif), atau dalam bahasa Al-Qur'an disebut *Ahsani Taqwim*, yakni berada pada posisi teratas atau sempurna (Q.S. 95:4).

Dari pandangan *ontologi* tersebut menunjukkan bahwa realita manusia pada dasarnya memiliki dua dimensi, antara dimensi positif dan dimensi negatif yang dapat membentuk pandangan hidup manusia.

Dimensi *epistemologi*, melihat kondisi demikian, Allah menurunkan *al-'ilm* atau *al-ma'rifah* (pengetahuan), yang diprogram melalui pendidikan, dalam rangka untuk memberikan alternatif pilihan (kemungkinan-kemungkinan) yang diambil oleh manusia. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan Islam, diperlukan adanya jati diri (pendirian) dalam menentukan pandangan hidup manusia bagaimana yang akan diorientasikan, karena hal ini akan berimplikasi pada konsep dasar kurikulum.

Jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan *jasmaniyah* atau pandangan hidup duniawi saja, maka program pendidikan harus didesain (visi, misi, tujuan dan

muatan/content pendidikan) diarahkan pada pemenuhan kebutuhan duniawi saja. sebaliknya jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan *ruhaniyah* (kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat) atau pandangan semesta, maka program pendidikan harus di desain (visi, misi, tujuan, dan muatan content pendidikan), diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup di dunia dan akhirat.

Dimensi nilai (*aksiologi*), dengan adanya pandangan hidup yang tercermin dalam sikap dan ketrampilan hidup manusia sebagai hasil pilihan dari pengetahuan, maka manusia dapat menentukan nilai-nilai mana yang akan digunakan dalam hidup dan kehidupan ini. Hal ini terkait dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah . dalam pandangan Islam bahwa tujuan diciptakannya manusia tak lain adalah untuk mengemban tugas Allah menjadi ‘*abdulah* dan sekaligus sebagai *khalifatullah fil ardhi*, dalam rangka mewujudkan tatanan hidup yang *rahmatan lil-‘alamin*.

b. Membangun Sistem Pendidikan Islam

Dalam rangka membangun konsep pendidikan Islam sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 20 tahun 2003, selain membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

1) Membangun Muatan (*Content*) Sistem Pendidikan Islam

Upaya membangun sistem pendidikan Islam yang perlu mendapat prioritas adalah bangunan muatan (*content*) pendidikan, bukan metodologinya. M. Naquib Al-Attas menjelaskan “apa yang harus direncanakan dan diimplementasikan bahkan metodologi pendidikan atau teknik-teknik pengajaran sebagai objek utama

usaha untuk merencanakan sistem pendidikan yang koheren dan rasional, melainkan muatan dari apa yang diajarkan”²¹⁷. Hal ini bukan berarti bahwa metodologi atau teknik pengajaran itu tidak penting, namun yang perlu diprioritaskan adalah bangunan aspek muatan.

Bangunan muatan pendidikan Islam, menurut M. Naquib Al-Attas, berangkat dari pandangan bahwa karena manusia itu bersifat dualistis, maka muatan pendidikan harus memiliki dua aspek. *Pertama*, yang memenuhi kebutuhannya yang berdimensi permanen dan spiritual; dan *kedua*, yang memenuhi kebutuhan material dan emosional.²¹⁸ Disini perlu ditambahkan lagi yaitu yang *ketiga*, yang memenuhi kebutuhan keterampilan manusia atau kecakapan hidup manusia. Dengan demikian ada tiga aspek muatan yang membangun sistem pendidikan Islam, yaitu: (1) aspek Ke-Islaman; (2) aspek Keilmuan; dan (3) aspek *Life Skill*.

Aspek ke-Islaman merupakan konten pendidikan Islam yang pokok, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual. Dengan kata lain sebagai dasar dalam menumbuh-kembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah .

Pemahaman ke-Islaman mengandung dua unsur, yaitu *pertama* sebagai muatan berupa materi pendidikan Islam, artinya bahwa muatan sistem pendidikan Islam harus memuat materi-materi pokok ajaran Islam yang akan diberikan kepada peserta didik, dengan meliputi: materi *akidah*, *syari'ah*, *akhlak*, dan *sejarah/tarikh*.

²¹⁷M Naquib Al-Attas, *falsafah dan Amalan...*, hlm. 51.

²¹⁸*Ibid.*, hlm. 67.

Aspek ini menjadi *core* dari aspek lain, seperti aspek keilmuan, aspek life skill, dan menjadi nilai-nilai dasar dari pengembangan laboratorium fungsi ganda.

Secara konseptual tujuan materi keIslaman agar peserta didik mampu memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertaqwa kepada Allah, dan berakhlak mulia. Sejalan dengan hal tersebut seorang muslim yang mengetahui Islam dengan baik akan menjadi seorang muslim yang *'alim* ataupun *'arif* dan segala sikap dan tindak tanduknya terjaga oleh ilmu dan pengetahuannya.

Pandangan ini menunjukkan bahwa dengan diberikannya materi pendidikan Islam, dengan segala konsekuensinya, akan menjadikan peserta didik mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga peserta didik tersebut menjadi seorang muslim yang *'alim* dan *'arif*.

Dilihat dari sistematika ajaran Islam, ada hubungan yang erat antara materi yang satu dengan lainnya. Karena materi-materi tersebut merupakan *hirarchi* keilmuan dibidang agama, yang semuanya bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti merupakan sumber *akidah* (keimanan), *syari'ah* (*ibadah* dan *muamalah*), *akhlak* dan *sejarah Islam*, sehingga kajiannya berada pada setiap unsur tersebut. Akidah merupakan akar atau pokok agama yang harus diinternalisasikan kedalam diri peserta didik, sehingga dengan akidah kuat, akan termotivasi dirinya untuk mengamalkan ibadah, *muamalah* dan akhlak.

Syari'ah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang diatur melalui ibadah dalam arti khas (*thaharah*, shalat, zakat,

puasa dan haji), sedangkan dengan sesama manusia, dan alam atau makhluk lain, disebut muamalah dalam arti luas. Akhlak merupakan aspek sikap atau kepribadian hidup manusia, dalam arti memberikan teknik pada sistem norma (*syari'ah*) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah khas), dan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain atau alam (*muamalah*). Semua ini menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan dan mengembangkan sistem kehidupannya, yakni kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, iptek, kebudayaan dan lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang dilandasi oleh akidah yang kuat. Sedangkan *tarikh* atau sejarah merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa kemasa dalam ikhtiar bersyari'ah, berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.

Sedangkan unsur kedua, sebagai muatan (*content*) berupa nilai-nilai pendidikan Islam, artinya muatan (*content*) ini dapat diinternalisasikan melalui penciptaan kondisi lingkungan belajar dikelas (proses pembelajaran), dan lingkungan sekolah yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nilai-nilai Islami, sehingga akan tercipta kultur sekolah yang penuh dengan nuansa Islami. Konsekuensinya harus ada komitmen bersama dari unsur-unsur pengelola pendidikan.

Muatan kedua adalah aspek keilmuan. Dalam rangka membangun sistem pendidikan Islam, aspek keilmuan ini penting sebagai muatan (*content*) pendidikan. Sebab Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada status yang sangat istimewa, hal ini dapat dilihat dari firman Allah, dalam Q.S. Al-Mujaadilah ayat 11. Artinya:

“..... Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....”.

Bukti signifikansinya bahwa wahyu pertama diterima Nabi . dimulai dengan perintah Allah ”*bacalah*” atau *iqra*’ (Q.S., 96:1-5). Makna *iqra*’ bisa juga “mengkaji, menelaah, menganalisis” terhadap fenomena-fenomena yang diciptakan oleh Allah, baik yang tertulis (Al-Quran), maupun yang tidak tertulis (tanda-tanda atau simbol-simbol Allah di alam ini). Dalam ayat berikutnya (Q.S., 96:4-5). Menunjukkan arti penting membaca sebagai aktivitas intelektual dan menulis yang dilambangkan dengan *qalam*. Abdurrahman Mas’ud mendefinisikan “*qalam*” adalah “sebagai simbol transformasi ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi berikut”.²¹⁹

Pemahaman ilmu pengetahuan disini bukan pemahaman yang dikotomis melainkan pemahaman kebersatuan dari sumber Allah . M. Naquib Al-Attas menegaskan bahwa “semua ilmu pengetahuan datang dari Allah ”.²²⁰

Karena itu bangunan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam harus menghilangkan pemikiran dikotomis. Abdurrahman Mas’ud menjelaskan secara teoritis, bahwa: ajaran dasar Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi demikian, lebih merupakan mainstream historis yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun kebenaran, misi, dan substansi ajaran Islam yang universal tentu tidak mengenal sekat-sekat kekinian dan kedisinian.²²¹

²¹⁹Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas Format...*, hlm. 87.

²²⁰M Naquib Al-Attas, *Falsafah dan Amalan...*, hlm. 123.

²²¹Abdurrahman Mas’ud, *Menggagas..*, hlm. 89

Pandangan ini perlu digaris bawahi, bahwa dalam ajaran Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis, namun karena adanya keterbatasan hidup manusia, kemuliaan tanggung jawab untuk mencarinya, dan ketidakterbatasannya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah, maka secara realitas para sarjana muslim membagi dan mengklarifikasikan ilmu pengetahuan.

Al-Baghdadi misalnya yang dikutip oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan terbagi dua: (a) ilmu pengetahuan Allah yang absolut; (b) ilmu pengetahuan hewani yang terdiri dari ilmu pengetahuan natural, primer dan sekunder, yaitu ilmu pengetahuan yang dicari (*muktasab*).²²²

Sementara M. Naquib Al-Attas, mengategorikan ilmu pengetahuan ke dalam dua bagian, yaitu iluminasi (*ma'rifat*), dan ilmu sains, atau dalam bahasa melayu yang pertama disebut ilmu pengenalan dan yang kedua disebut ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, beliau mengategorisasikan ilmu tersebut didasarkan pada hakekat yang *inheren* dalam keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang mereka tempuh untuk memperolehnya.

Sedangkan menurut Usman Abu Bakar, ilmu pengetahuan terbagi kedalam empat: (a) *naql*, yakni bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) yang tertulis; (b) *'aql*, yakni yang bersumber dari akal dan rasio (intelekt) dengan segala pengembangannya; (c) *insaniyah*, yakni bersumber dari hubungan manusia; dan (d) *kauniyah*, yakni bersumber dari alam.²²³

²²²Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, (terj), Hamid Fahmy, dkk, (Bandung: Mizan, 2003). Hlm. 58.

²²³Usman Abu Bakar, dan Surohim, *Fungsi Ganda...*, hlm. 64.

Klasifikasi tersebut sudah mengakomodir perkembangan dunia pendidikan kontemporer dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Hal ini dapat diuraikan, *pertama*, ilmu *naql*, yakni ilmu yang digali dan didasarkan dari sumber ajaran Islam (Al-Qur'an dan Sunnah), dan dikembangkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi. Wujud dari ilmu *naql* adalah ilmu ke-Islaman tradisional, seperti: Ulumul-Qur'an, Ulumul-Hadits, akidah, *syari'ah* (ibadah dan muamalah), akhlak, ilmu kalam, tashawwuf, serta sejarah Islam atau *tarikh* dan lain sebagainya.

Tujuan ilmu *naql* (ilmu ke-Islaman tradisional), meminjam istilah M. Naquib Al-Attas adalah sebagai bentuk persiapan spiritual peserta didik,²²⁴ agar mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga menjadi seorang muslim yang beriman, bertaqwa, 'alim, 'arif, dan segala sikap dan keterampilan terjaga oleh ilmu dan pengetahuan ke-Islaman yang dimilikinya. Internalisasi ilmu *naql* ini menjadi anak didik memiliki dimensi ketuhanan yang dapat menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan.

Kedua, Ilmu 'Aql, yakni suatu ilmu yang bersumber dari akal atau rasio (intelekt). Akal ('*aql*) adalah fakultas mental yang mensistematisasikan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika, memungkinkan pengalaman menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Pengertian ilmu '*aql*, adalah sesuatu pengetahuan yang dihasilkan dari kajian, analisis tentang suatu objek empiris sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Bentuk dari ilmu '*aql*

²²⁴M Naquib Al-Attas, *Falsafah dan amalan ...*, hlm. 90.

seperti: filsafat, dan matematika, logika, dan lain sebagainya. Tujuan diberikan ilmu *'aql*, agar anak didik menjadi manusia yang *ulil albab*.

Ketiga, Ilmu Insaniyah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari manusia, seperti: ilmu kedokteran, biologi, sosiologi, ekonomi, politik, hukum dan antropologi, serta psikologi. Dalam konteks pendidikan Indonesia disebut dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu insaniyah ini akan memberikan wawasan kepada peserta didik tentang manusia, sehingga diharapkan anak didik memiliki dimensi kemanusiaan, yang dapat menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan.

Keempat, Ilmu Kauniah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari alam, seperti: fisika, kimia, geologi, geografi, dan lain sebagainya atau dalam bahasa globalnya meliputi *natural* dan *science*. Yang ada kaitannya dengan alam, atau dalam konteks keIndonesiaan disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu kauniah ini pada dasarnya akan memberikan wawasan tentang alam, sehingga peserta didik dapat memiliki dimensi kealaman, yang dapat melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan teknologi, serta kesadaran yang mendalam untuk melestarikannya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus dieksploitasi seandainya, melainkan sebagai mitra dan sahabat.

Aspek yang ketiga dari muatan pendidikan Islam adalah aspek *life skill*. Aspek ini memberikan bekal kepada peserta didik tentang bagaimana memiliki

kecakapan hidup. Pada dataran inilah pentingnya konsep *link and match* dalam dunia pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, unsur-unsur yang dapat menumbuhkembangkan kecakapan hidup manusia adalah bahasa, teknologi, dan *interpreneurship* (jiwa kewirausahaan). Bahasa merupakan salah satu unsur kecakapan hidup manusia dalam berkomunikasi dengan lainnya, teknologi juga demikian, sebagai alat untuk mempermudah ikhtiar manusia dalam mencari kebahagiaan hidup, *intrepreneurship* (jiwa kewirausahaan) merupakan unsur kecakapan hidup dalam berusaha dan bekerja.

Hal-hal yang diuraikan di atas, pada dasarnya memberikan landasan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang akan diproyeksikan melalui pengembangan laboratorium fungsi ganda. Hal ini dimaksud agar dapat mewujudkan *akuntabilitas* pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

2) Pengembangan Laboratorium Fungsi Ganda

Makna esensial dari mengembangkan laboratorium fungsi ganda dalam dunia pendidikan adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat peningkatan mutu akademik dan mengembangkan dunia bisnis. Atau dengan kata lain memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk meningkatkan mutu akademik dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan usaha bisnis.

Pemberdayaan ini relevan dengan visi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU no.20 tahun 2003, yakni terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara

Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Visi di atas mengandung kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan proses pendidikan menuju keunggulan.

Kaitannya dengan konsep Laboratorium fungsi ganda adalah untuk menjadikan kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan satuan pendidikannya dalam kerangka menuju keunggulan. Upaya mewujudkan kemandirian dan keunggulan sekolah, sangat ditentukan pada mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

a) Peningkatan Mutu Akademik

Berhasil tidaknya sekolah/madrasah dapat dilihat dari penyelenggaraan programnya, dan ini sangat terkait dengan sistem akademiknya. Artinya keberhasilan sekolah/madrasah sangat ditentukan sistem akademiknya, karena itu harapan masyarakat agar lembaga pendidikan Islam ini akuntabel, maka upaya yang dilakukan adalah menata kembali sistem akademiknya.

Sistem akademik yang dimaksud disini adalah unsur-unsur atau komponen yang terlibat langsung dalam pendidikan, seperti: pendidik, anak didik, kurikulum, alat-alat teknologi dan informasi, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana (fasilitas fisik), dan karyawan. Unsur-unsur tersebut harus dapat difungsikan seoptimal mungkin dan secara terpadu atau saling terkait dan mendukung.

Upaya menata sistem akademik dalam rangka mencapai *akuntabilitas* lembaga pendidikan Islam menurut Fasli Jalal adalah: diperlukan kurikulum yang

relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang memadai dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan.

Pendapat tersebut manggarisbawahi, bahwa dalam menata sistem akademik lembaga pendidikan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan antara lain:

1. menciptakan suasana lingkungan sekolah/madrasah, dan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nuansa Islami
2. mendisain dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan memperhitungkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat
3. memerlukan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi dan kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar dan lembaga pendidikan Islam
4. adanya komitmen bersama dari para pengelola (pimpinan, pendidik, karyawan, dewan sekolah, komite sekolah) untuk mencapai kemandirian dan keunggulan
5. adanya fasilitas yang menunjang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan
6. adanya perangkat aturan yang jelas dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, dan dilaksanakan secara konsisten oleh para pengelola.

Asumsinya jika langkah-langkah tersebut dapat terimplementasikan dalam satuan pendidikan Islam secara baik dan konsisten, maka akan meningkatkan mutu akademik. Karena itu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu akademik lembaga adalah memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam

proses pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan tersebut tetap terjaga dan terjamin kelulusannya.

Upaya peningkatan mutu akademik sangat terkait dengan produktifitas komponen-komponen pendidikan Islam, terutama keprofesionalan para pengelola pendidikan.

b) Penajaman Visi Dan Misi Pendidikan Islam

Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan Islam, dan pendidikan Islam yang akuntabel dalam rangka menuju kemandirian dan keunggulan, adalah senantiasa memiliki visi dan misi yang jelas, dan harus dipahami oleh semua unsur pengelola pendidikan sebagai landasan kerjasama yang dapat memberikan kekuatan dalam penyelenggaraan program akademik (pendidikan). Sebab visi dan misi merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen sekolah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Eksistensi visi dan misi akan memberikan inspirasi dan dorongan seluruh warga lembaga pendidikan Islam untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan fungsi akademiknya. Karena itu visi dan misi lembaga pendidikan Islam harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, positif, realitas, menantang, mengundang partisipasi dan menunjang gambaran masa depan.

Relevansinya dengan visi dan misi pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari visi dan misi agama Islam. Sebagaimana diyakini setiap muslim bahwa Islam adalah sebagai agama wahyu terakhir yang mengemban misi *rahmatan lil-'alamin*, yakni terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis dan harmonis.

Merujuk visi dan misi utama Islam tersebut maka visi yang akan dirumuskan dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, adalah *”terwujudnya sistem pendidikan Islam sebagai pranata penyiapan kader-kader abduallah sekaligus khalifah yang memiliki kualitas iman dan taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tinggi sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil-‘alamin”*.

Implikasi dari rumusan visi tersebut perlu dijabarkan secara operasional melalui misi pendidikan Islam. Mengingat luasnya cakupan penataan sistem pendidikan Islam, maka perumusan misi pendidikan Islam dapat dipetakan: a) menciptakan suasana dan iklim pendidikan yang kondusif, harmonis, demokratis, berkeadilan, dan penuh dengan nilai-nilai Islami; b) menciptakan lembaga pendidikan sebagai pusat penyiapan kader-kader yang profesional, berdedikasi tinggi (akhlak mulia); d) membantu dan memfasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh; dan e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam mencapai *akuntabilitas* lembaga pendidikan Islam secara mandiri menuju keunggulan.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan Islam tersebut, jika dijadikan landasan kerjasama dalam meningkatkan mutu akademik pendidikan Islam, maka akan memberikan nuansa baru dalam sistem pendidikan Islam kedepan, dan pada gilirannya akan tercapai *akuntabilitas* pendidikan Islam. Karena itu visi dan misi tersebut harus diinternalisasikan dan dijabarkan melalui tujuan pendidikan Islam.

c) Mempertegas Tujuan Pendidikan Islam

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan Islam untuk mengakomodasi berbagai tuntutan yang bersifat multidimensional. Dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, dimana anak didik akan dibekali dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan, yakni wawasan tentang Tuhan, wawasan tentang manusia, dan wawasan tentang alam, maka rumusan tujuan pendidikan Islam paling tidak mengandung wawasan-wawasan tersebut.

Undang-undang No. 20 tahun 2003, menetapkan rumusan tujuan pendidikan, yakni:

Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional tersebut diatas, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan atmosfer dan proses pendidikan yang Islami, kondusif, harmonis dan penuh dialogis, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan keterampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai *khalifatullah fil ardhi*, dalam rangka mewujudkan *rahmatan lil-alamin*.

4. Kurikulum dan Materi Ajar Pendidikan Islam

Keberhasilan suatu program pendidikan Islam sangat bergantung pada perencanaan program kurikulum pendidikan itu sendiri, sebab kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karena itu perencanaan program kurikulum harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Artinya substansi kurikulum yang memuat berbagai materi ajar (pelajaran) harus mencerminkan dan menjabarkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, program kurikulum harus lebih diorientasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa akan datang. Artinya mengakomodir seluruh kebutuhan hidup manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah, sehingga desain dan pengembangan kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini UU no.20 tahun 2003 Bab X pasal 36 ayat 2 menetapkan, bahwa *“kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”*. Oleh karena itu, kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan pada: (1) peningkatan iman dan taqwa; (2) peningkatan akhlak mulia; (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (6) tuntutan dunia kerja; (7) perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni; (8) agama; (9) dinamika perkembangan global; dan (10) perasatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, dan terwujudnya akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, konfigurasi kurikulum harus memiliki relevansi atau keterkaitan fungsional antara mata pelajaran satu terhadap yang lain dalam satu kesatuan rencana pembelajaran yang utuh. Disamping itu setiap satuan mata pelajaran harus memiliki relevansi dengan kebutuhan hidup peserta didik dalam memasuki jenjang kehidupan yang lebih luas, yakni jenjang kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, perlu memperhatikan prinsip diversifikasi, yakni memungkinkan adanya penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan Islam dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah. Dalam konteks ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

a. **Beban dan Isi Kurikulum.**

Padatnya kurikulum berakibat pada padatnya informasi pada buku teks dan hal ini berimplikasi pula terhadap beban belajar peserta didik terlalu berat dan semakin berat pula beban orang tua untuk membeli buku teks. Dalam konteks ini perlu adanya pertimbangan beban kurikulum, dan perlu juga adanya pengurangan jumlah mata pelajaran sekaligus jumlah materi pada setiap mata pelajaran, sehingga beban belajar peserta didik tidak terlalu berat. Hal ini dimaksudkan secara kuantitatif untuk memberi perhatian pada dimensi nilai (*values*) dari setiap

pelajaran. Di samping guru dapat lebih memperhatikan keterkaitan materi pelajaran dengan konteks kehidupan peserta didik.

Dalam kepentingan ini paling tidak ada tiga aspek muatan beban dan isi kurikulum, yakni aspek ke-Islaman, aspek keilmuan, dan aspek *life skill*. Dengan mempertimbangkan beban kurikulum tersebut, guru memiliki kebebasan untuk menerapkan kurikulum dengan memperhatikan kompetensi dasar minimum yang disyaratkan bagi peserta didik, antara lain: Menghilangkan substansi pelajaran yang berulang-ulang; menawarkan ketuntasan belajar; menyediakan materi terapan yang dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupannya; dan menyajikan kurikulum pilihan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

b. Relevansi Kurikulum

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan adanya kurikulum yang sesuai dengan zamannya menjadi relevan. Artinya materi pelajaran sebagai muatan dalam kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini penguasaan *life skill*, seperti penguasaan bahasa, terutama bahasa asing, dan ketrampilan menggunakan alat-alat teknologi, seperti komputer dan internet mesti mendapat perhatian lebih, disamping nilai-nilai dasar ke-Islaman.

Pembelajaran bahasa asing dan komputer perlu diberikan kepada peserta didik sejak memasuki jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Alasannya, anak usia SD/MI akan cepat menguasai materi pelajaran tersebut,

apabila diberikan secara *habit forming* (pembentukan kebiasaan). Sedangkan pelajaran materi *life skill* (bahasa dan komputer) tersebut dapat dimasukkan dalam pengajaran kurikuler atau ekstrakurikuler sore hari atau pagi hari.

c. Buku Pelajaran.

Buku yang dipilih atau diselenggarakan oleh sekolah sekurang-kurangnya memuat antara lain; (1) isi buku mencakup materi yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh peserta didik pada setiap tingkat; (2) menciptakan pembelajaran yang melibatkan segala potensi yang ada dalam masyarakat untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan; (3) memperhatikan masalah kekinian dan masa akan datang; dan (4) mengakomodasi berbagai perbedaan peserta didik dalam hal kesiapan, potensi, akademik, minat, serta lingkungan dan budaya, demi pemerataan mutu dan kesempatan belajar yang bermakna bagi peserta didik.

d. Program Penjurusan Sekolah

Mestinya disadari bahwa program penjurusan di sekolah menengah umum yang dilakukan pada saat peserta didik memasuki kelas III adalah kurang efektif. Hal ini minat peserta didik tidak dikembangkan sejak dini, yang akibatnya banyak peserta didik terpaksa belajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya selama dua tahun.

Disamping itu, secara kualitatif apa yang akan diperoleh peserta didik dalam program penjurusan tidak akan maksimal karena rentangan waktu efektifitas

belajar hanya antara 6 – 8 bulan (kelas III). Untuk mengatasi hal tersebut, program penjurusan di sekolah menengah umum atau Madrasah Aliyah harus dilakukan diawal kelas II, agar peserta didik tidak dengan terpaksa mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

e. **Metodologi Pembelajaran**

Mastuhu menjelaskan, bahwa metodologi pembelajaran adalah proses bagaimana mengajar dan belajar atau “*learn how to learn*” yang merupakan syarat penting dan menentukan bagi tercapainya penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sedangkan pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Berbicara mengenai pembelajaran tidak lepas dengan bagaimana (*how to*) membelajarkan anak didik sehingga dengan mudah dan termotivasi dirinya untuk mempelajari apa (*what to*) yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, tentunya harus diciptakan atmosfir pembelajaran yang dapat memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri dan dunianya, sehingga berkembang kreatifitas, ide dan keterampilannya. Karena itu metodologi pembelajaran yang terbaik adalah metodologi pembelajaran yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut.

Dalam proses pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling mempengaruhi, yakni: kondisi pembelajaran; metode pembelajaran; dan hasil pembelajaran. Ketiga komponen ini merupakan kewajiban bagi pendidik dan

tenaga kependidikan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kondusif, kreatif, dinamis dan dialogis.

Kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran, demikian juga metode pembelajaran merupakan cara tertentu yang efektif dan efisien untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran yang berada pada kondisi pembelajaran tertentu. Karena itu, metode pembelajaran dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pembelajaran yang berbeda pula dalam rangka mencapai hasil pembelajaran. Namun, apapun bentuk dan corak metodologi pembelajaran yang di terapkan dalam mengaktualisasikan kurikulum, salah satu prinsip yang digunakan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak didik untuk menemukan jalan belajar sendiri, tanpa takut dan tanpa tekanan.

Upaya untuk mengkondisikan pembelajaran yang bermakna, kondusif, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan materi ajar, kemampuan dan peserta didik, budaya dan kondisi daerah, serta tujuan yang ingin dicapai; (2) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran, baik berupa perangkat keras, seperti komputer, proyektor, televisi dan lain-lain, maupun perangkat lunak, sehingga tidak terjadi pemborosan, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah; (3) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan program studinya dengan waktu yang singkat dan hasil yang bagus; (4) kesesuaian dan kemampuan metode pembelajaran dengan tumbuh kembangnya

kultur akademik di lingkungan sekolah atau kampus; (5) membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, melalui *transfer of knowledge* sekaligus *transfer of values*.

f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berhasil atau tidaknya peningkatan mutu akademik sekolah/madrasah sangat tergantung pada kualitas para aktor dan petugas yang melaksanakan, seperti pimpinan, pendidik, seluruh tenaga kependidikan sampai dengan petugas penjaga sekolah. Setiap upaya pembenahan kualitas pendidikan, yang pertama kali harus digarap adalah pendidik dan tenaga kependidikan ini.

Mastuhu menyarankan agar para aktor tersebut mampu bekerja secara profesional dan berkualitas, maka ada beberapa syarat yang harus dimiliki: *pertama*, memiliki kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta kesadaran bahwa masing-masing tugasnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem jaringan kerja secara keseluruhan; *kedua*, memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani tugas; *ketiga*, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka mereka harus mendapatkan hak-haknya secara adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Relevasinya dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, UU no. 20 tahun 2003 pasal 39 telah menetapkan, bahwa:

(1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (2) pendidik merupakan tenaga

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Konsekuensinya pendidik dan tenaga kependidikan harus ditempatkan secara profesional menjalankan tugas dan kewajibannya, namun tetap dalam akademik lembaga. Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, maka pendidik dan tenaga kependidikan sama-sama berkewajiban dalam: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam suatu pandangan mengenai profesionalisme pendidik (guru) direfleksikan dalam citra pendidik masa depan, yaitu pendidik yang: (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualitas profesional; (3) rasional, demokratis dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman. Sadar dan tanggap akan perubahan zaman artinya pendidik diharapkan menguasai daya pemikiran masa depan dan prediktif. Sedangkan pendidik profesional adalah pendidik yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkan, mampu mengajarkannya secara efektif, efisien dan berkepribadian luhur.

g. Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu akademik adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sekedar mengingatkan, bahwa konsep pendidikan Islam di Indonesia sebaik apapun, jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang baik apakah berupa fasilitas laboratorium, perpustakaan dan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan, pelayanan yang dilandasi atas pemenuhan kebutuhan peserta didik, atau dukungan-dukungan lain yang berbasis pada teknologi informasi, maka tidak ada jaminan keberhasilan akan penerapan konsep pendidikan Islam tersebut.

Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan, memang tidak lepas dari permasalahan dana lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang notabeneanya hanya mengandalkan dana SPP dan dana bangunan dari peserta didik, serta harapan subsidi dari pemerintah. Terlepas dari permasalahan tersebut, penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan khususnya infrastruktur berbasis teknologi menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam.

Pendayagunaan teknologi pendidikan tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan, melainkan lebih dari itu memunculkan citra dimata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang tanggap dengan tuntutan zaman.

Teknologi pendukung yang paling memberikan kesan bagi eksistensinya lembaga pendidikan Islam adalah perlengkapan laboratorium, baik laboratorium dakwah, bahasa, maupun industri, kimia, biologi dan bidang eksakta secara umum,

juga kebutuhan teknologi multimedia untuk kebutuhan presentasi pembelajaran atau perkuliahan, seminar maupun untuk menunjang perpustakaan. Kebutuhan pendayagunaan teknologi ini selain memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang akuntabel dimata publik, secara fungsional mempermudah civitas akademika untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran.

h. Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, sebab manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif dan efisien.

Terkait dengan manajemen adalah kecakapan pimpinan. Ada beberapa kriteria pemimpin yang cakap dalam konteks pendidikan, yaitu pemimpin yang mampu:

- (1) Menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pendidik, bahkan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik,
- (2) Memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengoordinasian proses instruksional,
- (3) Berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa dan masyarakat terkait.

Relevansinya pemimpin dalam pandangan Islam adalah harus memiliki empat prinsip yang di sebut STAF, yakni: *Sidiq* (benar), *Tabligh* (menyampaikan), *Amanah* (dipercaya), dan *Fathonah* (cerdas). Prinsip-prinsip inilah yang mendasari keprofesionalan seseorang pemimpin pendidikan.

Prinsip *Sidiq* (benar), artinya setiap aktivitas pemimpin dan manajemen pendidikan, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan selalu meletakkan landasan kebenaran. Pemimpin yang demikian memiliki visi dan misi untuk mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip *Tabligh*, artinya pemimpin selalu membimbing, mengarahkan, mengayomi, berkomunikasi dan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang benar dalam meningkatkan etos kerja terhadap bawahannya.

Prinsip *Amanah* (dipercaya), artinya pemimpin memiliki loyalitas dan komitmen tinggi dalam menciptakan etos kerja yang bermakna, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, serta bertanggung jawab penuh dengan aktivitas pengelolaan pendidikan, baik mengenai mutu pendidikan, maupun kesejahteraan bawahannya.

Prinsip *Fathonah* (cerdas), artinya pemimpin yang memiliki kualitas iman, kedalaman pengetahuan dan ketrampilan profesional dalam pengelolaan pendidikan, serta tanggap dalam perkembangan zaman dan memiliki wawasan luas dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki citra di mata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang *akuntabel* (menjaga dan menjamin mutu kelulusan).

i. Jaringan Kemitraan (*Networking*)

Hubungan kemitraan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat simbiotik, yakni hubungan yang mampu mendorong perkembangan pendidikan, bukan hubungan yang mengambil keuntungan finansial dari pendidikan untuk kepentingan pribadi (*stakeholder*), namun keuntungan tersebut untuk investasi bagi peningkatan mutu pendidikan Islam.

Upaya yang perlu dilakukan dalam menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik tersebut, adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Bentuk wadah ini dapat berupa “Dewan sekolah” dan “Komite sekolah”, sebagaimana ditetapkan dalam UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 56. Wadah ini berfungsi melembagakan hubungan simbiotik, sehingga hubungan tidak hanya terjadi secara insidental, melainkan secara berkelanjutan,
- (2) Dilakukan regulasi dengan membuat aturan yang mengatur kewenangan, untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam batas kewenangan yang dilakukan,

- (3) Dikembangkan upaya-upaya memotivasi dari hubungan simbiotik tersebut kerangka ikut bertanggung jawab bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan (mutu kelulusannya).

Hubungan kemitraan ini perlu dilakukan dalam kerangka pemberdayaan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi peningkatan mutu akademik, juga berfungsi untuk pengembangan usaha bisnis.

j. Pengembangan Usaha Bisnis

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam yang *akuntabel*, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai asumsi rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam (terutama swasta), karena rendahnya aktivitas dan kualitas pendidik, ini disebabkan karena tidak didukung adanya fasilitas yang cukup, dan bermuara pada sedikitnya dana dalam alokasi pendidikan, sehingga untuk menyediakan fasilitas tersebut tidak mencukupi.

Berdasarkan asumsi di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah masalah dana. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusinya harus memberdayakan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi meningkatkan mutu akademik adalah mengembangkan usaha bisnis.

Dalam konteks pengembangan usaha bisnis, bukan sekolah atau lembaga itu dibisniskan, dalam arti menarik pembayaran kepada peserta didik dan orang tua dengan biaya mahal, sehingga hanya terjangkau bagi kalangan masyarakat kelas

menengah atas, sementara kelas menengah bawah tidak memperolehnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan Islam mengembangkan usaha bisnis di luar sistem akademik, seperti usaha pertokoan (super market atau mini market), membuat rumah kontrakan, dan atau memberi/menanamkan modal kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan *income* (masukan) dana bagi lembaga tersebut.

Asumsi yang digunakan adalah karena ada peluang bagi lembaga pendidikan Islam khususnya:

- (1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam
- (2) Pemerintah telah memberikan hak otonomi dan penyelenggaraan setiap satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan Islam, sehingga otoritas pengelolaan terletak pada satuan pendidikan tersebut
- (3) Secara eksplisit substansi dari UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengisyaratkan adanya *akuntabilitas* lembaga pendidikan secara mandiri menuju keunggulan, dengan meletakkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
- (4) Adanya Bank *Syari'ah* yang didirikan di Indonesia, sebagai badan perbankan umat Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjalin kemitraan (*networking*).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, maka sudah saatnya lembaga pendidikan Islam harus memberdayakan dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Dengan harapan keuntungan pendapat dari usaha bisnis tersebut, sebagai investasi

bagi peningkatan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kerangka mencapai *akuntabilitas* lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan usaha bisnis, adalah menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik dengan pihak lain. Dalam kepentingan ini, pihak Bank *Syari'ah* sebagai badan perbankan umat Islam yang notabene berusaha memperjuangkan umat melalui institusi bank.

Di sinilah umat Islam Indonesia, para pengambil keputusan baik pihak lembaga pendidikan Islam, maupun pihak bank *syari'ah* diuji komitmen kesyari'ahan dan idelaisme, juga wawasannya, apakah tetap akan membiarkan keterbelakangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka konsep pendidikan Islam yang ditawarkan tersebut pada dasarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena undang-undang ini secara konseptual merupakan titik balik pencerahan dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan sistem pendidikan Islam. Untuk itu, konsep yang ditawarkan di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengaktualisasikan sistem pendidikan Islam di Indonesia.²²⁵

²²⁵Usman Abu Bakar, dan Surohim, *Fungsi Ganda...*, hlm. 119-173.